

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARASI DAN KEPERCAYAAN
TERHADAP MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT
(Studi di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah)**



TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Megister Ekonomi (M.E.)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

INTAN SURI MAHARDIKA PERTIWI

NPM : 1860102019

Program studi : Ekonomi Syari'ah

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2021 M

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARASI DAN KEPERCAYAAN
TERHADAP MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT
(Studi di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah)**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Megister Ekonomi (M.E.)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

INTAN SURI MAHARDIKA PERTIWI

NPM : 1860102019

Program studi : Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Prof. Dr.H. Suharto, S.H.,M.A.

Pembimbing II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2021 M

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang terdapat di Asia Tenggara dan memiliki jumlah masyarakat muslim dengan jumlah mayoritas. Salah satu provinsi yang ada di negara Indonesia yakni Provinsi Lampung. Lampung merupakan provinsi yang ada di ujung sumatera. Mengacu pada data BPS pada 2019 Lampung memiliki penduduk sebesar 8.447.000 jiwa dengan jumlah muslim sebesar 93,55 %. Mengacu data pada BAZNAS potensi zakat sebesar 1,8 T dalam kurun waktu setahun akan tetapi total zakat didapatkan sebesar 1,15 M Artinya, dibandingkan dengan potensi yang besar pengumpulan zakat masih belum optimal. Pada penelitian ini Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah ? apakah transparansi berpengaruh secara parsial terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah? apakah kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah ? dan apakah akuntabilitas transparansi dan kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah ?

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*) data yang digunakan yakni data primer dengan mengacu kuisioner serta menggunakan data sekunder didapatkan melalui dokumentasi. Populasi yang digunakan yakni masyarakat Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Metode penarikan sampel yakni metode 100 sampel di Kota Bandar Lampung dan 100 sampel di Kabupaten Lampung tengah. Dengan total sampel keseluruhan sebanyak 200 sampel dan dianalisis dengan SPSS 20.

Akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Secara parsial nilai t hitung masing-masing variabel lebih besar dari pada t tabel. Secara simultan nilai F hitung Kota Bandar Lampung ($1019 > 2, 70$) dan nilai F hitung Kab. Lampung Tengah ($130 > 2, 70$) nilai tersebut menyatakan bahwa H_0 ditolak maka H_a dapat diterima yang memiliki arti bahwa akuntabilitas, transparansi serta kepercayaan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Alamat : Jl. Yulius Usman No 12 Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp.0721-787392

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat (Studi di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah)

Nama : Intan Suri Mahardika Pertiwi

NPM : 1860102019

Jurusan : Megister Ekonomi Syari'ah

Telah diajukan dalam ujian tertutup dan disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 24 Februari 2021

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A
NIP. 1953042319800301003

Pembimbing II,

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121001

Ketua Jurusan,

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt
NIP. 197009262008011008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. Fulus Usman No 12 Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp.0721-787392

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat (Studi di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah)”** ditulis oleh : **Intan Suri Mahardika Pertiwi**, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : **1860102019** telah diujikan dalam ujian tertutup Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Mardhiyah Hayati, S.P.,M.S.I

(.....)

Penguji I : Dr. Heni Noviarita, M.Si

(.....)

Penguji II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

(.....)

Tanggal Ujian Tertutup pada : 13 Maret 2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. Tulus Usman No 12 Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp.021-787392

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat (Studi di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah)”** ditulis oleh : Intan Suri Mahardika Pertiwi, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 1860102019 telah disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Mardhiyah Hayati, S.P.,M.S.I

(.....)

Penguji I : Dr. Heni Noviarita, M.Si

(.....)

Penguji II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

(.....)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat : Jl. Yulus Osman No 12 Labuhan Batu-Bandar Lampung 35142 Tlp.021-787392

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparasi dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat (Studi di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah)” ditulis oleh : Intan Suri Mahardika Pertiwi, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 1860102019 telah diujikan dalam ujian terbuka Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Mardhiyah Hayati, S.P.,M.S.I

(.....)

Penguji I : Dr. Heni Noviarita, M.Si

(.....)

Penguji II : Prof.Dr.H.Suharto,S.H.,M.A

(.....)

Penguji III : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

(.....)

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung**

**Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag
NIP. 196010201988031005**

MOTTO

1. Q.S Al-Mujaddilah (58) : 11

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أُنْشُرُوا فَادْنُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan¹

2. Al-insyiroh (94) : 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya : Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014) hal 542

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014) hal 596

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas izin dan ridho-Nya yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini, penulisan tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku papa dan mama (Drs.H.Yusup Zulkarnain, MM. dan Herni B.) yang sangat saya hormati dan saya cintai. Selalu menguatkan ku dengan sepenuh hati, merawatku, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, serta selalu mendo'akan ku agar terus dalam jalan-Nya. Berkat doa restu mereka penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk papa dan mama.
2. Adik-adiku tersayang (Icha Putri Tsany dan M. Fachri Akbar) berkat doa, dukungan dan senyum semangatnya penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. Seluruh keluarga besarku, sahabat-sahabatku yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
4. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung semoga semakin maju, selalu jaya dan berkualitas

Riwayat Hidup

Penulis memiliki nama lengkap Intan Suri Mahardika Pertiwi, di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 maret 1996, Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Drs.H. Yusup Zulkarnain, MM dan ibu Herni B. Penulis bertempat tinggal di Jalan Putri Balau Gg PN Raja Hukum No 2 Kedamaian Bandar Lampung.

Jenjang pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. RA. Arrussidah II lulus pada tahun 2002
2. SDN 1 Tanjung Agung lulus pada tahun 2008
3. MTsN 1 Bandar lampung lulus pada tahun 2011
4. MAN 1 (Model) Bandar Lampung lulus pada tahun 2014
5. Strata 1 di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) lulus pada tahun 2018
6. Saat ini sedang menempuh Strata 2 di UIN Raden Intan Lampung, Megister Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puja dan puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga tesis dengan judul “*Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat (studi : BAZNAS Kota Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah)*” dapat terselesaikan, Shalawat serta salam dalam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Dua (S2) Jurusan Magister Ekonomi Syariah di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (M.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian tesis ini, tak lupa diucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag selaku direktur program pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM.,Akt.,CA dan Ibu Mardiah Hayati, M.S.I selaku Kajur dan Sekjur Magister Ekonomi Syariah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.

3. Bapak Prof. Dr. Suharto, M.H.,M.A (Pembimbing I) dan Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (Pembimbing II) sebagai dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan, dukungan, saran dan kritik kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Kedua orangtuaku, saudara dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Kakak-Kakakku kelas A dan B Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan 2018 terima kasih telah sama-sama berjuang dan memberi selalu mendukung penulis dari perkuliahan hingga penulisan tesisi ini.
6. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan tesis ini, Semoga Allah membalas budi baik kalian semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINIL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan	12
F. Manfaat	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Zakat	14
1. Zakat Menurut Bahasa.....	14
2. Zakat Menurut istilah.....	16

B. Landasan Hukum Zakat	18
1. Al-Qur'an.....	18
2. Hadis	20
3. Ijma	20
4. Undang-Undang	21
C. Syarat-syarat wajib zakat	21
1. Muslim.....	22
2. Merdeka	22
3. Berakal.....	22
4. Baliqh.....	24
D. Macam-macam zakat	25
1. Zakat Fitrah.....	25
2. Zakat Mal.....	27
a. Zakat emas dan perak.....	27
b. Zakat hewan ternak	28
1) Unta	28
2) Sapi/ Kerbau	29
3) Kambing	30
c. Zakat Perdagangan.....	31
d. Zakat Rikaz dan Barang tambang	31
e. Zakat Pertanian	32
f. Zakat Profesi	33
E. Mustahiq zakat.....	33
1. Farkir	34
2. Miskin	34
3. Amil	35
4. Muallaf.....	35
5. Riqab.....	36
6. Gharimin.....	36
7. Fi sabillilah	36
8. Ibnu Sabil.....	36
F. Hikmah Zakat	37
G. Minat Membayar Zakat	38
1. Definisi Minat.....	38
2. Macam-Macam Minat	40
3. Fungsi Minat.....	41
4. Faktor yang Mempengaruhi timbulnya minat	42
5. Minat dalam Islam	42
H. BAZNAS	43
J. Akuntabilitas	44

1. Konsep Akuntabilitas	44
2. Macam-Macam Akuntabilitas	50
3. Asas-Asas Akuntabilitas	51
4. Manfaat Akuntabilitas	52
5. Indikator Akuntabilitas	52
6. Akuntabilitas dalam Islam	53
I. Transparasi.....	59
1. Konsep Trasnparasi	57
2. Asas-asas Transparasi	62
3. Tujuan Transparasi	62
4. Manfaat Transparasi	63
5. Indikator Transparasi	63
6. Transparasi dalam Islam	63
J. Kepercayaan	65
1. Konsep Kepercayaan	65
2. Dimensi Kepercayaan.....	69
3. <i>Core Value</i> Kepercayaan	70
4. Kepercayaan dalam Islam.....	74
K. Penelitian Terdahulu yang Relevan	77
L. Kerangka Pikir	80
M. Hipotesis	81
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	82
B. Sifat Penelitian.....	82
C. Definisi Konseptual	83
D. Instrumen Penelitian	86
E. Sumber Data	89
1. Data Primer.....	89
2. Data Sekunder.....	89
F. Populasi dan Sampel.....	90
1. Populasi	90
2. Sampel	91
G. Metode Pengumpulan Data	91
1. Kuisisioner	92
2. Dokumentasi	92
H. Analisis Data	93
1. Uji Validitas	93
2. Uji Reliabilitas.....	94
3. Uji Asumsi Klasik	95
4. Uji Hipotesis	95

a. Analisis Regresi Linear Berganda.....	95
b. Uji T (parsial)	96
c. Uji F (Simultan)	96
d. R2 Koefisien Determinasi	96

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data	98
1. Gambaran Umum BAZNAS Prov Lampung	98
2. Jenis-jenis Program	98
B. Analisis Data.....	99
1. Pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah	99
2. Pengaruh transparasi secara parsial terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah	127
3. Pengaruh kepercayaan secara parsial terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah	133
4. Pengaruh Akuntabilitas, transparasi dan kepercayaan secara simultan terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah.....	141

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	147
B. Saran	148

DAFTAR PUSTAKA.....149

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengaruh zakat terhadap penurunan kemiskinan	3
Tabel 1.2 Potensi zakat Nasional	5
Tabel 1.3 Pertumbuhan pengumpulan zakat	5
Tabel 1.4 Potensi zakat provinsi Lampung	9
Tabel 2.1 <i>Nishab</i> unta dan zakatnya	29
Tabel 2.2 <i>Nishab</i> Sapi atau kerbau dan zakatnya	30
Tabel 2.3 <i>Nishab</i> kambing dan zakatnya	31
Tabel 2.4 Penelitian terdahulu yang relevan	77
Tabel 3.1 Definisi Konseptual	83
Tabel 3.2 Variabel Penelitian	84
Tabel 3.3 Instrumen penelitian	86
Tabel 4.1 Uji Validitas Variabel X1 Kota Bandar Lampung	101
Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel X2 Kota Bandar Lampung	101
Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel X3 Kota Bandar Lampung	102
Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Y Kota Bandar Lampung	102
Tabel 4.5 Uji Relibilitas Kota Bandar Lampung	103
Tabel 4.6 Uji Multikolineritas Kota Bandar Lampung	104
Tabel 4.7 Uji Heteroditas Kota Bandar Lampung	105
Tabel 4.8 Analisis Regresi Berganda Kota Bandar Lampung	107
Tabel 4.9 Uji T (Parsial) Kota Bandar Lampung	109
Tabel 4.10 Uji Validitas Variabel X1 Kab. Lampung Tengah	117
Tabel 4.11 Uji Validitas Variabel X2 Kab. Lampung Tengah	117
Tabel 4.12 Uji Validitas Variabel X3 Kab Lampung Tengah	117

Tabel 4.13 Uji Validitas Variabel Y Kab Lampung Tengah	118
Tabel 4.14 Uji Reliabilitas Kab Lampung Tengah	120
Tabel 4.15 Uji Multikolinearitas Kab Lampung Tengah.....	121
Tabel 4.16 Uji Heteroditas Kab Lampung Tengah.....	149
Tabel 4.17 Analisis Regresi Berganda Kab Lampung Tengah.....	122
Tabel 4.18 Uji T (parsial) Kab. Lampung Tengah.....	124
Tabel 4.19 Uji Koefisien Determinasi Kota Bandar Lampung.....	141
Tabel 4.20 Uji F (Simultan) Kota Bandar Lampung	142
Tabel 4.21 Uji Koefisien Determinasi Kab Lampung Tengah	144
Tabel 4.22 Uji F (Simultan) Kab Lampung Tengah	145



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar Kuisioner

Lampiran 2 Karakteristik responden

Lampiran 3 Distribusi jawaban responden

Lampiran 4 Jawaban Responden tentang akuntabilitas

Lampiran 5 Jawaban Responden tentang transparasi

Lampiran 6 Jawaban Responden tentang kepercayaan

Lampiran 7 Jawaban Responden tentang minat

Lampiran 7 Uji Validitas Variabel X1,X2,X3 dan Y

Lampiran 8 Uji Relibilitas

Lampiran 9 Uji Asumsi Klasik

Lampiran 10 Uji R2, uji F, uji T

Lampiran 11 Tabel T

Lampiran 12 Tabel R

Lampiran 13 Tabel F

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanggulangan kesenjangan ekonomi secara umum dengan cara pembayaran pajak penghasilan serta melalui pajak kekayaan pribadi.¹ Menurut Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah ditetapkan strategi pembangunan ekonomi yaitu strategi *Pro Growth*, strategi *Pro job* dan Strategi *pro poor*. Langkah ini diyakini mempercepat terjadinya laju pertumbuhan ekonomi serta terjadinya perbaikan distribusi pendapatan.²

Pandangan ekonomi Islam solusi dari masalah kemiskinan dan ketimpangan adalah dengan memberdayakan zakat dan mengimplementasikannya didalam kebijakan ekonomi Indonesia. Secara umum, Pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi sudah banyak diimplementasikan dan dilakukan diberbagai negara. Kajian di Malaysia menunjukan implementasi zakat mempunyai dampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.³ Kemudian di negara pakistan, juga dikaji. Hasil kajian dipakistan menyatakan bahwa penerimaan dana zakat

¹ Todaro *Pembangunan ekonomi* (Jakarta : Erlangga 2011), hal.299.

² Tri Wibowo *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tinjauan Analisis Regional* (Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 16 No 2 Tahun 2012), hal .23.

³ Muhammed B Yusof, *Zakat Expenditure, School 181Enrollment and Economic Growth in Malaysia*, International Journal Of Business and Social Science, Vol 2 No 6 2011, hal 175-181

memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.⁴

Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim yang wajib ditunaikan jika hartanya telah mencapai *nishab*. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan rukun Islam ketiga.⁵ Adapun Perintah membayar zakat Allah tegaskan dalam Al qur'an surah Al- Baqoroh ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : dan dirikanlah shalat, serta tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku⁶

Makna dari ayat tersebut mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita agar melaksanakan shalat dengan cara yang tepat dan memberikan zakat kepada seseorang yang membutuhkan.⁷

Kontribusi yang dihasilkan dari zakat dapat menekan ketimpangan sosial serta ketimpangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu Penelitian yang diteliti oleh *Indonesia Magnifience Of Zakah (IMZ)*. Hasil penelitian menyatakan bahwa zakat dapat memiliki peran untuk meningkatkan persentase pengentasan kemiskinan yaitu sebesar 24%.⁸

⁴ Muhammad Azzam, Nasir Iqbal *Zakat and Economic development: Micro and Macro level Evidence from Pakistan*, Bulletin Of Business and Economics 3(2), 2014 hal 85-95

⁵ Syarif Hidayatullah, *Ekslopedia rukun islam ibadah tanpa khilafah* (Jakarta : Al Kausar Prima ,2008), hal.3.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014 hal.7.

⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifai *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Jakarta : Gema Insani 2000), hal. 520.

⁸ Indonesia Magnifience Of Zakah. *Contermpory interpretation Of Zakah Asnaf : Piqih Economic and Sociology Perseptive* Agustus 2012

Tabel 1.1
Pengaruh pemberian Zakat terhadap menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan Model CIBEST

Jenis Indeks CIBEST	Sebelum adanya Program Zakat	Setelah adanya Program zakat	Hasil perubahan akibat zakat
Indeks Kemiskinan dari Aspek Material	0,801	0,304	(-49,6)
Indeks Kemiskinan dari Aspek Spritual	0,049	0,033	(-1,0)
Indeks Kemiskinan dari Aspek Absolut	0, 123	0	(-12,3)
Indeks Kesejahteraan Masyarakat	0,024	0,661	(-63,7)

Sumber : Irfan dan pratama Tahun 2016

Riset dampak pemberian pendistribusian zakat yang diteliti oleh Beik dan juga Pratama di lembaga amil zakat terbesar di Indonesia dengan menggunakan model CIBEST hasil penelitian menyatakan bahwa adanya pengaruh zakat pada menurunnya tingkat kemiskinan material dan kemiskinan spritual.⁹ Zakat mampu membentangkan masalah ketimpangan ekonomi dan juga kemiskinan jika dapat dikelola oleh lembaga profesional dan juga lembaga yang terpercaya dari amil,¹⁰ karena zakat juga memiliki peran sebagai instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan untuk menegakkan ketimpangan masyarakat. Zakat dapat mendorong tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat.¹¹ Sehingga bila zakat dapat

⁹ Irfan Syauqi Beik dan C pratama, *Analisa Pengaruh zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Okesejahteraan mustahiq berdasarkan model CIBEST* dalam Bank Indonesia *Pengelolaan zakat yang efektif* (Jakarta : DEKS Bank Indonesia & P3EI FE UII) hal 28

¹⁰ Ishaq, K.A. *Integrating Traditional Institutions in International Development: Revitalizing Zakat to Reduce Poverty in Muslim Societies*. (Dissertation. University of Oregon. 2013)

¹¹ Muhammad B. Yusof , *Zakat Expenditure, School Enrollment, and Economic growth in Malaysia* (International journal of business science, Vol 2 No 6 April 2011), hal.175-18.

diimplementasikan dengan baik maka akan terciptanya masyarakat yang memiliki kualitas yang baik.¹²

Zakat juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam perekonomian skala kecil yaitu perekonomian keluarga dan memberi kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi secara besar. Pendistribusian zakat juga dilakukan sebagai sumber pendapatan di suatu negara untuk mencapai kesejahteraan.¹³ Kesejahteraan adalah suatu keadaan yang menjadi impian setiap warga negara.¹⁴ Zakat dapat dikonseptualisasikan tidak hanya sebagai kewajiban tetapi juga sebagai tugas sosial.¹⁵ Selaras terhadap prinsip distribusi dalam Ekonomi Islam yaitu agar kekayaan yang dimiliki tak menyebar di orang-orang yang mampu saja diantara kamu.

Kegiatan inti mendasar dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh dibagi menjadi 4 kegiatan utama yaitu penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian.¹⁶ Untuk memudahkan membayar di Indonesia, Pemerintah menyediakan lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian dana zakat kepada seseorang yang menerimanya (*Mustahiq*). Lembaga itu yakni BAZNAS.

¹² Ruslan Abdul Ghofur, *Peran distribusi ekonomi islam dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IKONOMIKA), Volume 1 Nomor 1, Mei 2016, hal 27-39

¹³ Ahmad Maslahatul Furqan dkk, *Diskursus Zakat Sebagai Sumber Penerimaan APBN* (Working Paper Keuangan Publik Islam No 3 Seri 1 Tahun 2018) hal 11

¹⁴ Lailiyatun Nafiah “ *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq* “ El-Qist, Vol 5 No 1 (April 2015) hal 307

¹⁵ Taylor dan Francis *Reconceptualising zakat di indonesia(indonesia dan melayu dunia)* (Monash University Vol 42 No 142 , pp 337-357. 08 desember 2014 Routledge) hal 37-41

¹⁶ DEKS Bank Indonesiadan P3EI FE UII *Pengelola Zakat yang efektif* (Jakarta : Bank Indonesia 2016), hal.109.

Tabel 1.2
Potensi Zakat Nasional

Jenis Potensi Zakat	Besar Potensi	Presentasi daya serap pada PDB (%)
Sektor Rumah Tangga	82,7 T	1.30
Sektor Industri Swasta	114, 9 T	1.80
Sektor BUMN	.2,4 T	0.04
Sektor Tabungan	17 T	0.27
Total Nasional	217 T	3.40 %

Sumber : Riset BAZNAS dan FEM IPB

Hasil dari data potensi zakat yang terdapat di Negara Indonesia sebesar 217 T. Dengan melihat potensi yang sangat besar, seharusnya zakat sangat memungkinkan mengetaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja dan mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Berdasarkan perhitungan potensi zakat nasional yang sangat besar belum dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Tabel 1.3
Pertumbuhan Pehimpunan Zakat Tahun 2002-2017

Tahun	ZIS (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan PDB (%)
2002	68.39	0	3.7
2003	85.28	24.70	4.1
2004	150.09	76.00	5.1
2005	295.52	96.90	5.7
2006	373.17	26.28	5.5
2007	740.00	98.30	6.3
2008	920.00	24.32	6.2
2009	1.200.00	30.43	4.9
2010	1.500.00	25.00	6.1
2011	1.729.00	15.27	6.5
2012	2.212.00	27.94	6.23
2013	2.639.00	19.30	5.78
2014	3.300.00	25.05	5.02
2015	3.650.00	10.61	5.04

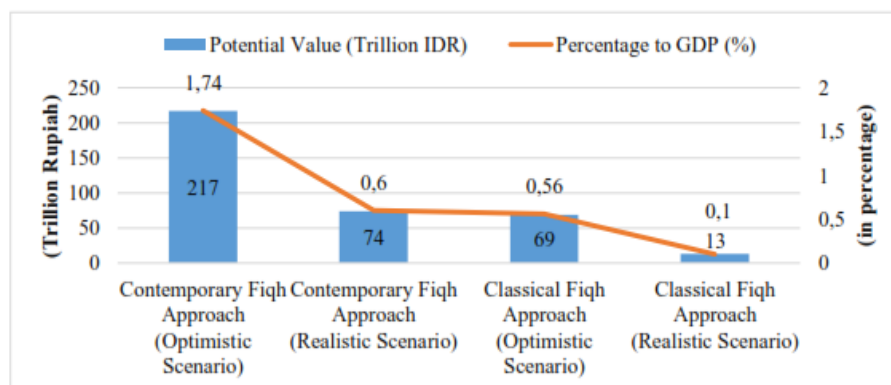
2016	5.017.29	37.46	5.02
2017	6.224.37	24.06	5.07
Rata-Rata		35.10	5.39

Sumber : Statistik Zakat Nasional, 2017

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyatakan bahwa potensi zakat pada tahun 2011 adalah 217 T.¹⁷ Potensi zakat ini terdiri dari berbagai aspek yaitu potensi zakat rumah tangga (keluarga) sebesar 82,7 T, kemudian potensi zakat pihak swasta mencapai angka 114,89T, potensi zakat BUMN 2,4 T serta potensi melalui tabungan sejumlah 17 T akan tetapi total zakat berhasil didapatkan oleh BAZNAS dari semua Unit Pengelola Zakat di Indonesia pada tahun 2016 sebesar Rp 3,6 T kemudian meningkat menjadi Rp 5 T pada tahun 2017, dan sebesar Rp6 T pada tahun 2018.¹⁸ walau pun jumlah yang meningkat, Tetapi jumlah absolutnya masih sangat kecil dan sedikit

Gambar : 1.1

Potensi Penghimpunan Zakat Nasional



Sumber: BAZNAS. Indeks Literasi Zakat, Tahun 2019

¹⁷ Hamka *Zakat Community development: Model pengembangan zakat* (Jakarta : Direktorat jendral bina Masyarakat islam 2013), hal. 3.

¹⁸ BAZNAS *Statistik Zakat Nasional* (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasionnal 2018), hal

Gambar 1, menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia. Jika mengacu pada piqih kontemporer potensi zakat nasional Indonesia mencapai 217 Triliun. Dengan Presentase perhitungan sebesar 47% dari perhitungan potensi penghimpunan terendah yaitu Rp13 Triliun dan 2.8% dari potensi penghimpunan zakat tertinggi.

Hal tersebut dinyatakan bahwa terdapat ketimpangan yang sangat tinggi antara penghimpunan dan juga hasil yang diperoleh. Hal ini diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Terkait permasalahan rendahnya penghimpunan zakat melalui lembaga amil resmi di Indonesia

Mengacu pada fakta bahwa jumlah pajak masyarakat muslim Nasional sebesar 90 % dari total penduduk serta potensi zakat yang mencapai angka 217 T/tahunnya, jika melihat jumlah tersebut, pelaksanaan serta penghimpunan dana zakat Nasional masih dianggap kurang optimal. Ketidakoptimalan total pengumpulan dana zakat disebabkan oleh beberapa aspek antara lain literasi masyarakat tentang zakat yang masih rendah.

Hasil dari Survey lembaga (*Publik Interest Research and Advocacy Center*) dengan mengacu pada kota besar yang ada di Indonesia dengan Hasil penelitian menyatakan bahwa potensi zakat mencapai 217 triliun.

Minat adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan jiwa seseorang dengan adanya perasaan senang.¹⁹ Penelitian tentang minat oleh Mukhlis dengan judul penelitian pengaruh minat terhadap kecenderungan menyalurkan kewajiban berzakat di baitulmall kota Lhokesumawe dengan hasil penelitian bahwa minat memiliki pengaruh terhadap kepercayaan seseorang dalam membayar zakatnya²⁰ Sedangkan menurut penelitian yang dikerjakan oleh ferry dengan hasil penelitian bahwa reputasi lembaga dan kepercayaan masyarakat sangat berpengaruh pada minat *muzzaki* dalam membayar zakat profesi.²¹ Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat berpengaruh terhadap loyalitas *muzzaki*.²²

Provinsi Lampung merupakan salah satu provisi paling ujung yang ada di pulau sumatera. Memiliki 2 kota dan 13 Kabupaten. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik, Lampung mempunyai jumlah penduduk 8.289.577 orang. Dari jumlah keseluruhan penduduk 8.289.577 jiwa, Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas 93,55% masyarakat.

¹⁹ Muhammad Fathurohman *Belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta : Teras 2012) hal 173

²⁰ Mukhlis Muhammad dan Zulfahmi *Pengaruh pengetahuan, pendapatan dan kepercayaan terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat di baitulmall kota Lhokesumawe*. Volume 01 Nomor 3 Desember tahun 2018 E ISSN : 2615-126 x

²¹ Fery Setiawan *pengaruh. Religiutas, Kepercayaan Dan Reputasi terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat profesi kabupaten ponorogo* (Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017), hal.11.

²² Indriyuliantri dan Asma Khoiriyah *Pengaruh kepuasan Muzzaki , Transparansi dan Akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzzaki studi pada LAZ Rumah Zakat* Islamicconomic Jurnal Ekonomi Islam Volume 7 No 2 2016 hal 205-218

Tabel 1.4
Potensi Zakat Lampung

No	Kota/Kabupaten	PDRB (dalam Miliaran)	Dengan Metode PBB UIN syarif Hidayatullah	Dengan Metode Wibisono	Dengan Metode IRTI/ IDB
			(0.8% dari PDRB)	(1.7 % dari PDRB)	(3.4 % dari PDRB)
1	Lampung Tengah	40.951	327.608 Juta	696.167 Juta	1.3 Miliar
2	Lampung Timur	26.207	209.656 Juta	445.519 Juta	891.038 Juta
3	Lampung Selatan	25.943	207.544 Juta	441.031 Juta	882.062 Juta0
4	Lampung Utara	14.136	113.088 Juta	240.312 Juta	480.624 Juta0
5	B.Lampung	32.859	262.872 Juta	558.603 Juta	1.1 M
6	Pesawaran	9.843	78.744 Juta	167.178 Juta	334.356 Juta
7	Tanggamus	9.372	74.976 Juta	159.324 Juta	318.648 Juta
8	Way Kanan	8.244	65.952 Juta	140.148 Juta	280.296 Juta
9	Tuba	6.713	53.704 Juta	114.121 Juta	228.242 Juta
10	Prengsewu	6.677	53.416 Juta	113.509 Juta	227.018 Juta
11	Lampung Barat	4.293	34.344 Juta	72.981 Juta	145.962 Juta
12	Metro	3.658	29.264 Juta	62.186 Juta	145.962 Juta
13	Pesisir Barat	2.655	21.24 Juta	45.135 Juta	90.27 Juta
Total Potensi Zakat			1.5 Miliar	3.2 Miliar	6.5 Miliar

Sumber data: Data BPS, diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil Tabel 1.4 menunjukkan bahwa potensi penerimaan dana zakat yang terdapat di provinsi lampung sangat besar. Apalagi jika dilihat dengan metode IRTI/IDB dengan optimisme pemasukan Rp 6.5M,

adapun potensi terendah dengan menggunakan metode PBB UIN Syarif Hidayatullah sebesar 1.5M. Penelitian Indra Caniago dan Kemala Hayati Lampung memiliki potensi zakat 1.3 T.²³ Bahkan ketua BAZNAS Provinsi Lampung menyatakan bahwa potensi zakat di Lampung sebesar 1.8 T. Tetapi total pengumpulan zakat oleh BAZNAS hanya 1,15 M. Sehingga penumpukan dana zakat belum bisa disebut optimal.

Penyebab rendahnya dana realisasi zakat dengan potensi yang ada diakibatkan oleh beberapa hal

1. kepercayaan *muzzaki* kepada Badan amil zakat ataupun lembaga pengelolaan zakat masih rendah, sehingga mengakibatkan *muzzaki* enggan menunaikan kewajiban zakat di lembaga pengelolaan zakat. Hal ini mengakibatkan data jumlah pengumpulan dana zakat yang ada tidak mendeskripsikan kondisi pembayaran zakat yang semestinya.
2. Masyarakat cenderung membayarkan zakat secara langsung kepada orang yang menerima. Tetapi terkadang pendistribusian dana zakat secara langsung kurang menjangkau masyarakat luas.
3. Rendahnya literasi masyarakat tentang pengelolaan zakat. Kebanyakan masyarakat umum hanya mengetahui pembayaran zakat sebatas zakat fitrah, padahal masih banyak jenis-jenis lain zakat selain zakat fitrah.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat secara umum dalam membayar zakat.
5. Regulasi yang belum sempurna terkait perzakatan.

²³ Indra Caniago *Zakah Potential As A Means To Overcome Poverty A Study in Lampung* (Lampung : Journal Of Indonesian Economy and Bussiness Volume 26 Number 2), hal. 200.

B. Identifikasi Masalah

1. Provinsi Lampung memiliki potensi dana zakat yakni 1,8 Triliun tapi jumlah zakat yang dikumpulkan Amil Zakat Nasional di Prov Lampung berjumlah 1,15 Miliar. Sehingga, dengan melihat potensi zakat pendistribusian masih belum optimal.
2. Minat muzzaki dalam menyalurkan zakat pada LAZ dan BAZ masih sangat rendah
3. Pentingnya menyalurkan zakat dengan lembaga Amil zakat ataupun Badan amil zakat guna mengetaskan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi

C. Pembatasan Masalah

Agar mendapatkan hasil yang terfokus dan memiliki arah yang jelas pada permasalahan yang ingin diteliti serta mencapai target yang diharapkan, maka penulis melakukan pembatasan masalah yang akan penulis teliti. penulis membatasi penelitian ini pada minat menunaikan zakat di Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Kota dan kabupaten tersebut dipilih karena memiliki potensi yang besar dibandingkan kabupaten/Kota yang lainnya.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas secara parsial memiliki pengaruh pada minat masyarakat membayar zakat pada BAZNAS ?
2. Apakah transparansi secara parsial memiliki pengaruh pada minat membayar zakat pada BAZNAS?

3. Apakah kepercayaan secara parsial memiliki pengaruh pada minat menunaikan zakat di BAZNAS?
4. Apakah akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan secara bersama-sama memiliki pengaruh kepadaminat masyarakat menunaikanr zakat di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas secara parsial pada minat *muzzaki* menunaikan zakat pada BAZNAS.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi secara parsial pada minat *muzzaki* menunaikan zakat pada BAZNAS.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS.
4. Untuk menguji tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan secara bersama-sama di BAZNAS.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini dari segi teoritis memperbanyak literasi tentang ilmu dan pengetahuan dalam bidang zakat yang bertujuan untuk pengoptimalkan potensi zakat dengan harapan mensupport program Badan amil zakat nasional kemudian untuk acuan refrensi ilmu pengetahuan yang mendukung bagii peneliti serta berbagai pihak yang tertarik untuk meneliti hal serupa.

2. Manfaat Penelitian secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi BAZNAS mengenai deskripsi tentang organisasi pengelolaan zakat yang akuntabel, transparansi dan dapat dipercaya oleh muzaki sehingga *muzzaki* tertarik untuk membayar zakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran serta informasi untuk semua pihak terutama masyarakat. Sehingga dana zakat yang akan dikumpulkan dapat disalurkan dengan baik kepada mereka yang membutuhkan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Zakat

1. Zakat Menurut Bahasa

Zakat secara bahasa dapat diartikan bertambah atau berkembang. Maknanya yakni sesuatu yang jumlah dan ukurannya dapat tumbuh dan berkembang disebut dengan zakat.²⁴ Asal kata zakat yakni berasal dari *zaka* yang diartikan mempunyai keberkahan, tumbuh atau menjadi baik.²⁵ Menurut Ahmad Hadi kata “zakat” juga dapat diartikan menjadi subur dan meningkat.²⁶ Dengan demikian arti dari kata zakat yakni dapat membersihkan serta mensucikan harta. Sehingga dapat diartikan jika harta yang dizakatkan akan menjadi suci dan berkah²⁷

Seseorang yang mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat orang tersebut diberkahi oleh Allah SWT. Dapat dimaknai zakat secara bahasa bertujuan untuk membuat harta menjadi berkembang dan menjadikan harta tersebut suci.²⁸ Dalam Al-Quran dijelaskan makna zakat secara bahasa yakni dalam QS.Al-Baqoroh: 2 : 276

²⁴ Syekh Muhammad Shalih al Utsmani *Ensiklopedia zakat* (Jakarta : Pustaka Assunah) hal 450

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah : Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha Fi Al-Qur'an Wa Alsunnah*, Jilid 1 Cetakan ke 3 (Beirut : Muassasah Al Risalah 1977), hal.37.

²⁶ Ahmad Hadi Yasin *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta : Dompot duafa Republika 2012), hal.10.

²⁷ Asnani *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008), hal.23.

²⁸ DR. KH. Didin Hafidhuddin *Zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta : Gema isnani 2011), hal.7.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Allah Memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah.²⁹

buku fakhruddin zakat diartikan sebagai berikut ³⁰

- a. *Thaharah* yang diartikan sebagai bersih. Dengan demikian zakat dapat membersihkan dan juga mensucikan . Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah (9) : 103. Jadi *muzzaki* yang membayarkan zakat maka hati jiwa dan batinnya akan bersih dan suci sebagaimana pengertian dari *thaharah*. Selain hati dan jiwa bersih, kekayaan yang dimiliki juga akan menjadi bersih karena zakat yang telah ditunaikan tersebut dapat membersihkan dan mensyucikan hati seseorang dengan memusnahkan sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta.
- b. *Namma* dapat diartikan sebagai tumbuh juga berkembang. Dalam QS. Al-Baqoroh (2) : 276. Dapat diartikan sebagai seseorang yang menunaikan zakat, harta nya dapat berkembang.
- c. *Al-Barakah* dapat diartikan sebagai bentuk dari karunia Allah SWT. Dengan makna karunia Allah SWT maka seseorang yang

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014), hal.47.

³⁰ Fakhruddin, *Fikih dan manajemen zakat di indonesia* (Malang : UIN Malang Press, 2008), hal.13- 14.

mengeluarkan zakat mendapatkan balasan dari Allah SWT, balasan tersebut dapat dimaknai sebagai karunia Allah SWT.

2. Zakat Menurut Istilah

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-4 yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslim.³¹ Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.³² Sedangkan menurut istilah fikih zakat merupakan jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.³³

Korelasi arti zakat dari segi bahasa dan istilah mengandung makna harta yang telah dikeluarkan zakatnya dapat membuat harta tersebut menjadi suci, tumbuh serta terdapat keberkahan pada harta tersebut.³⁴ Pandangan ulama dari empat mazhab utama dalam memaknai zakat yaitu³⁵ :

a. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i zakat merupakan sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta dengan cara yang khusus. Cara khusus menurut mazhab Syafi'i tentang langkah untuk

³¹ Azharsyah *Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal Dalam Sistem Ekonomi Islam*. (Jurnal Syari'ah 2011), hal. 10.

³² Sulaiman Rasyid *Piqih Zakat* (Jakarta : Sinar Baru Algensindo 2016), hal.192.

³³ Nurul Huda *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2013) hal 293

³⁴ Didin Hafidhudin , *Paduan lengkap Zakat infak dan sedekah* (Jakarta : Insani Press 2008), hal.13.

³⁵ Wahbah Al-Zuhayli. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2000), hal. 83-86.

mengambil harta dengan takaran yang telah dihitung dan juga akan diberikan pada *mustahiq* zakat.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menjelaskan makna zakat yakni membayarkan sebagian dari harta yang sudah melampaui ukuran (*nishab* yang wajib untuk diberi zakatnya) kepada (*mustahiq*) dengan syarat utama yaitu memiliki harta tersebut secara penuh dan telah mencapai waktu setahun.

c. Mazhab Hanafi

Mahzab Hanafi mendefinisikan zakat yaitu harta yang diberikan yaitu harta yang ditunaikan dari seseorang dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan syariat.

d. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali menerjemahkan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan yang diberikan kepada golongan tertentu. Dari mazhab hambali mengatakan bahwa kelompok tertentu yaitu kelompok yang disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Taubah (9): 60.

Para ulama mendefinisikan zakat dengan redaksi yang hampir serupa satu dengan yang lainnya yaitu harta yang harus dibayarkan dengan ketentuan tertentu dan diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya.³⁶

³⁶ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.23.

Jadi zakat merupakan instrumen dalam sistem ekonomi Islam untuk membantu kelompok yang kurang mampu dalam mencapai kebutuhan yang layak melalui redistribusi kekayaan.³⁷

B. Landasan Hukum Zakat

Zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai *nishab*. Zakat merupakan rukun islam ke 4 dan di dalam 82 kali alqur'an mengatakan bahwa zakat dan solat disatukan di dalamnya.³⁸ Dengan demikian hal ini menyatakan bahwa landasan hukum menunaikan kewajiban zakat sangat.³⁹

1. firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT yang pertama terdapat di Al-Qur'an

QS.Saba (34) : 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya⁴⁰

Dalam QS.Saba (34) ayat 39 Allah SWT yang melapangkan dan membatasi rizki setiap hambanya, Maka apa saja

³⁷ Ahmed, U.,Khalid, N.,Ammar, A.,& Shah *Assessing moderation of employee engagement on the Relationship between work discretion, Job clarity and business performance in the banking sector of pakistan* . Asian economic and financial review, 7 (12) 2017.hal 197-121

³⁸ Muhammad Bin Abdullah At-Tuwarijry *Makna islam dan Iman* (Jakarta : Abu ziyad 2017), hal.2.

³⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group 2008), hal.15.

⁴⁰ Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014), hal.47.

yang kalian dermakan maka Allah akan mengantinya karena Allah sebaik- baiknya pemberi rizki.⁴¹

- b. Firman Allah SWT yang kedua didalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqoroh(2) : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang orang yang ruku'.*⁴²

Dalam QS Al-Baqoroh ayat 43 Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mendirikan solat dan membayar zakat serta tunduk kepada Allah dengan menerima agama Islam. Pada ayat tersebut solat disatukan dengan zakat, dengan demikian kewajiban berzakat sebanding dengan kewajiban kita mengerjakan solat.⁴³

- c. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS Al-Baqoroh(2) : 110

Dalam Al-Baqoroh(2) ayat 110 Allah SWT memerintahkan untuk menjaga syiar agama Islam dengan mengerjakan solat dan menunaikan zakat. Perbuatan-perbuatan baik dan sedekah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala yang kita lakukan.⁴⁴

⁴¹ Muhammad Nasib Ar-Rifai *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Jakarta : Gema Insani 2000), hal.596.

⁴² Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014), hal.47.

⁴³ Muhammad Nasib Ar-Rifai0 *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Jakarta : Gema Insani 2000), hal 119.

⁴⁴ Hamka *Tafsir AL Azhar* (Jakarta : Pustaka Panjimas 1983), hal. 268.

2. Al- Hadist

Kewajiban membayar zakat juga dijelaskan didalam sabda Nabi muhammad SAW yaitu :

“ diriwayatkan dari Abdullah bin musa, beliau mengatakantelah dikabarkan kepada kami dari Hanzholah bin abi shufyan dari ‘ikrima bin Kholid bin ibn Umar r.a ia berkata Rasullah SAW bersabda “ Islam Itu atas dasar lima pondasi pokok, yaitu kesaksian bahwa tuhan selain Allah SWT dan Muhammmad adalah utusan Allah, dirikan solat, memunaikan zakat, melaksanakan haji serta berpuasa dibulan ramadhan” (HR. Bukhari).⁴⁵

Di dalam hadis tersebut menyatakan bahwasanya Pondasi agama Islam itu disusun 5 pilar yakni kalimat sahadat keyakinan akan adanya Allah SWT dan Nabi Muhammad adalah perintah Allah, menunaikan solat dan juga membayar zakat serta menunaikan haji dan juga berpuasa dibulan ramadhan. Dapat disimpulkan bahwa membayar zakat merupakan pilar dalam agama Islam.

3. Ijma’

Ijma merupakan kesepakatan seluruh umat Islam diseluruh negara. Diseluruh dunia umat muslim sepakat bahwa zakata adalah kewajiban yang ditunaikan oleh mereka yang sudah mampu. Semua ulama setuju bahwa jika tidak membayar zakat berarti menolak adanya rukun Islam dan memusuhi agama Islam secara langsung.⁴⁶ Kemudian, Sahabat setuju bahwa Para sahabat juga telah menyetujui untuk memberantas orang-orang yang enggan menunaikan zakat.⁴⁷

⁴⁵ Imam abu abdillah muhammad bin ismail bin ibrahim bin Almugirah bin Bardibah Al-bukhari Al Ja’f’iy, *Shahih Bakhari* (Beirut : Dar al-fikr) jilid 1 hal 8

⁴⁶ M. Yusuf Qardwi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1986, hal 97

⁴⁷ M quraish Shihab, *Membumikan Al-qur’an Fungsi dan peran wakaf dalam kehidupan Masyarakat* (mizan 2004) hal 223

4. Undang- Undang Republik Indonesia

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 yang membahas tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat merupakan suatu yang terdiri dari perencanaan, pengimplementasian, dan juga pengawasan untuk mengumpulkan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat untuk usaha produktif dengan tujuan pengetasan fakir miskin dan untuk meningkatkan kualitas umat.⁴⁸

C. Syarat-syarat *Muzzaki Zakat*

Syarat-syarat *muzzaki* untuk membayar zakat (wajib zakat) yakni :

1. Muslim

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-4 yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslim.⁴⁹ Islam mewajibkan umatnya untuk membayarkan zakat, kecuali ada hal yang dapat membatalkan kewajiban membayar zakat itu.⁵⁰ Syarat seseorang dikenakan kewajiban membayar zakat yakni harus beargama Islam. Seorang yang bukan beragama Islam ataupun kafir tidak diwajibkan untuk membayar zakat karena orang kafir ataupun bukan Islam tidak akan Allah terima meskipun dia telah menyalurkan atas nama zakat⁵¹

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 *tentang pengelolaan zakat* (Jakarta : BAZNAS 2012) hal 2

⁴⁹ Azharsyah *Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal Dalam Sistem Ekonomi Islam*. Jurnal Syari'ah, 2011 1-10.

⁵⁰ Yayat Hidayat, *Zakat profesi : Solusi mengetaskan kemiskinan umat*, (Bandung : Mulia Press 2008) hal 11-12

⁵¹ Syaikh muhammad shaih al-utsaimin, *Ensiklopedia Zakat* (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad Bin shalih AL-Utsaimin) Cet 1, Pustaka as-sunah, Jakarta 2008) hal 52

2. Merdeka

Merdeka merupakan orang-orang yang bebas serta dapat bertindak bebas. Seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat, kecuali zakat fitrah.⁵²

3. Berakal

Kewajiban membayar zakat diwajibkan kepada seseorang yang berakal dan tidak diwajibkan kepada seseorang yang tidak memiliki akal sehat. Maka kewajiban untuk menunaikan zakat menjadi musnah, sama seperti perintah menunaikan solat, melaksanakan puasa, menunaikan haji.

4. Keadaan yang Sudah Baligh

Muslim yang diwajibkan untuk menunaikan zakat merupakan seseorang yang telah mencapai usia dewasa selain membayar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan untuk seluruh Umat muslim tanpa terkecuali.⁵³ Syarat untuk membayar zakat dapat diperintahkan kepada harta seorang muslim dengan ketentuan berikut :

- a. Harta tersebut diperoleh dengan langkah-langkah yang halal dan juga langkah yang baik dengan demikian harta tersebut bukan harta haram, dari substansinya maupun bendanya serta langkah untuk memperolehnya. Jika hartanya didapatkan

⁵² Agus Thalib Afifi dan shabrina ika *Kekuatan zakat : Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Cet 1 (Jakarta : Pustaka Albana 2010) hal 50-51

⁵³ *Ibid.*

dengan cara yang kurang baik maka Allah SWT tidak memperkenankannya karena tidak akan Allah terima.⁵⁴

b. Pemilikan secara utuh

Kekayaan secara utuh merupakan kekuasaan yang berdasarkan kehendak kepribadian itu secara penuh, madusdnya yakni seluruhnya berada pada pengawasan dan kekuasaan si pemiliknya tanpa adanya pengaruh dari pihak luar.⁵⁵ Kekayaan secara utuh yang dimiliki pemiliknya yaitu *muzzaki* yang terkena kewajiban membayar zakat, kemudian harta tersebut juga dalam kekuasaan seluruhnya oleh *muzzaki*, tak ada sangkut paut dengan orang lain dan *muzzaki* tersbut harus bisa menggunakannya atas kehendak sendiri, sehingga jika harta tersebut untuk zakat maka sangat memungkinkan untuk memindahkan hartanya kepada yang berhak menerimanya.

c. Harta yang Berkembang

Harta yang berkembang merupakan harta yang akan tumbuh jika diikhtiarkan atau memiliki potensi harta tersebut akan berkembang. Berkembang merupakan hal amali berdasarkan ketentuan Allah ataupun usaha manusia⁵⁶ Artinya pengelolaan harta yang dapat memperoleh keuntungan dan juga manfaat bagi yang memilikinya.

⁵⁴Didin Hafinuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern* (Jakarta : Gema insani Press 2002) hal 7

⁵⁵ Dapartemen Agama RI, *Al Qur'an, Tajwid dan Terjemahan* (Bandung : Diponegoro 2010) hal 29

⁵⁶ Mohammmd Daud ali, *Sistem Ekonomi islam Zakat dan wakaf* (Jakarta : Ui press 1998) hal 41

d. Melebihi Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar yang harus ada pada individu ataupun keluarganya. kebutuhan dasar bertujuan untuk kelangsungan hidupnya. Artinya jika kebutuhan dasar tersebut tidak tercukupi oleh individu tersebut maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut hidupnya tidak layak.⁵⁷ Kebutuhan dasar harus dipenuhi karena jika kebutuhan yang tidak dipenuhi, akan menyebabkan terciptanya kesengsaraan dalam hidup.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam untuk menunaikan sebagian hartanya untuk ditunaikan kepada seseorang yang berhak untuk menunaikannya. Kemudian yang menjadi pembeda antara zakat fitrah dan zakat maal yakni zakat maal adalah zakat atas harta kekayaan yang telah melampaui kebutuhan secara pokok, mencapai waktu dan mencukupi takarannya. Kemudian zakat fitrah hanya seseorang yang muslim dan dapat memenuhi kebutuhan pokok dan ditunaikan saat bulan ramadhan atau sebelum jatuh pada waktu 1 Syawal (Idul Fitri).⁵⁸

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat pengurangan pajak penghasilan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006) hal 18

D. Macam-Macam Zakat

Ulama mahzab mempunyai pandangan yang sama yakni tidak sah membayar zakat tanpa adanya niat. Secara umum zakat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal.⁵⁹

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan jenis zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam tanpa melihat jenis kelamin ataupun usia. Zakat fitrah memiliki tujuan pokok yakni untuk mensyucikan diri seseorang. Zakat fitrah dikeluarkan saat bulan ramadhan sebelum tanggal 1 syawal.⁶⁰ Sebagaimana Allah SWT berfirman tentang zakat fitah terdapat dalam surat Al- A'la ayat 14 dan 15

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.*⁶¹

Total serta jenis zakat yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah 1 sha' tamar (menyesuaikan kebutuhan pokok) Pada umumnya di negara Indonesia zakat fitrah yang diberikan dengan menggunakan beras dengan berat 2,5 kg untuk satu orang.⁶²

Zakat fitrah bertujuan juga untuk mensyucikan diri dari berbagai dosa-dosa yang diperbuat selama bulan puasa, diharapkan dengan menyalurkan zakat fitrah maka Allah SWT akan

⁵⁹ Qasim rizal *Pengamalan Fikih* (Solo : PT tiga serangkai mandiri 2009) hal 20

⁶¹ Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014), hal 591

⁶² Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan sedekah* (Bandung : Tafakur 2011) hal 18

meringankan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Dengan demikian saat idul fitri tiba maka diri ini akan kembali bersih dan juga suci kembali. Zakat fitrah juga bertujuan untuk membuar senang hati para farkir miskin. Syarat-syarat zakat fitrah, ialah :

a. Muslim

Zakat fitrah diperintahkan kepada seorang yang beragam Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan dengan hadis berikut :

“ Bersumber dari Abdullah bin umar r.a bahwa rasullullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah yang dikeluarkan di akhir bulan ramadhan atas manusia, yaitu Sha' Tamar (Kurma kering) atau satu sha' syair (gandum), baik yang merdeka ataupun budak, baik pria maupun wanita dari kaum muslimin.”⁶³

b. Hidup pada dua waktu

Hidup pada dua waktu merupakan seseorang yang hidup pada akhir bulan Ramadhan dan malam Lebaran. Seseorang yang telah hidup pada dua waktu dalam keadaan muslim, maka dia diwajibkan unyuk membayarkan zakat fitrah.

c. Mempunyai kemampuan untuk membayarkan zakat

Seseorang yang dikenakan kewajiban untuk menyalurkan zakat fitrah adalah seseorang yang mempunyai kemampuan. Jika dia tidak mampu untuk membayarkannya, maka dia lepas pada kewajiban untuk membayarkan zakat.⁶⁴

⁶³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta :Pustaka As-sunah 2008)

⁶⁴ El Madani *Fiqih Zakat engkap* (Yogyakarta : Diva press 2013) hal 143- 144

2. Zakat Mal

Zakat mal merupakan jenis zakat yang dikeluarkan dengan persyaratan tertentu. Syarat tersebut terkait dengan persyaratan pemenuhan jumlah (*Nishab*) dan persyaratan pemenuhan waktu (*haul*). Zakat mal sesuai dengan firman Allah Al-baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*⁶⁵

Zakat mal yang harus dibayarkan zakatnya ada beberapa jenis jenis yakni :

a. Zakat emas dan zakat Perak

Emas dan perak adalah jenis logam mulia yang sering dijadikan sebagai perhiasan. Emas dan perak pernah dijadikan mata uang. Islam memandang perhiasan emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Jumlah emas yaitu seberat 85 gram atau berjumlah 20 dinar. Jadi jika seseorang mempunyai tabungan emas seberat 85 gram ataupun memasuki waktunya waktunya yaitu (satu tahun) Maka ia

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014), hal. 45

wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah emas miliknya itu. Selanjutnya, apabila emas tersebut masih ada padanya sampai setahun kemudian, wajiblah ia mengeluarkan lagi zakatnya sebanyak 2,5 % dari sisa yang dimilikinya dan begitulah seterusnya.

Nishab perak adalah 200 dirham seberat 595 gram. Maka apabila seseorang telah mempunyai perak seberat 595 gram dan telah memasuki waktunya maka dia harus mengeluarkan zakat atas perak tersebut seberat 2,5 % dari total perak yang ia miliki selama setahun tersebut.

b. Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang harus dikeluarkan zakatnya yakni unta, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, biri-biri. Allah SWT telah menganugerahkan manusia untuk memanfaatkan hewan-hewan tersebut dan mengambil manfaatnya dari hewan-hewan itu. Dengan syarat hewan tersebut bukanlah hewan tungangan, karena hewan tungangan tak dapat dizakatkan.

Zakat mal harus ditunaikan jika telah memenuhi persyaratannya: Jumlahnya sesuai dengan ketentuan, sudah memasuki waktu yang ditetapkan dan hewan itu bukan hewan pekerja keras. Hewan pekerja keras yakni hewan yang digunakan untuk mengangkat barang, bekerja dalam membajak sawah dan sebagainya. Adapun untuk menghitung zakatnya adalah sebagai berikut :

1) *Nishab* unta dan zakatnya

Unta yang kurang dari 5 ekor tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab zakat unta yakni

Tabel 2.1

***Nishab* Unta dan zakatnya**

<i>Nishab</i>	Zakatnya
5 s.d. 9 unta	1 kambing usia 24 bulan
10 s.d. 14 unta	2 kambing usia 24 bulan
15 s.d. 19 unta	3 kambing usia 24 bulan
20 s.d. 24 unta	4 kambing usia 24 bulan
25 s.d. 35 unta	1 anak unta betina usia 12 bulan
36 s.d. 45 unta	1 anak unta betina usia 24 bulan
46 s.d. 60 unta	1 anak unta betina usia 36 bulan
61 s.d. 75 unta	1 anak unta betina usia 48 bulan
76 s.d. 90 unta	2 anak unta betina usia 24 bulan
91 s.d. 120 unta	2 anak unta betina usia 36 bulan
Lebih dari 120 unta	3 anak unta betina usia 24 bulan

Sumber : Qasim Rizal, Tahun 20090

Jika total untanya telah melewati jumlah sebesar 121 ekor, maka per 40 ekor unta zakatnya sebesar seekor unta usia 2 tahun kemudian setiap 50 ekor, zakatnya satu unta ber usia 3 tahun.

2) *Nishab* sapi atau kerbau dan zakatnya

Jumlah minimal yang harus dizakatkan untuk sapi berjumlah 30 ekor.

Tabel 2.2

Nishab Sapi atau Kerbau dan zakatnya

<i>Nishab</i>	<i>Jumlah Zakat</i>
30 s.d. 39 ekor	1 anak sapi / kerbau usia 1 tahun
40 s.d. 59 ekor	1 ekor anak sapi/kerbau usia 2 tahun
60 s.d. 69 ekor	2 ekor anak sapi/kerbau usia 1 tahun
70 s.d. 79 ekor	1 ekor anak sapi/kerbau 2 tahun ditambah 1 ekor anak sapi/kerbau usia 1 tahun
80 s.d. 89 ekor	2 ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun

Sumber : Qasim Rizal, tahun 2009

Jika sapi telah berjumlah 30 ekor sapi/ maka zakatnya yaitu satu ekor sapi yang berusia satu tahun dan begitupun seterusnya.

3) ***Nishab kambing/ Domba dan zakatnya***

Jumlah zakat kambing yang harus dikeluarkan jika sudah mencapai 40 ekor. Jika belum mencapai jumlah sebesar 40 ekor kambing, maka tidak wajib zakat. Untuk hewan kambing zakatnya yaitu seekor domba dengan usia satu tahun atau bisa juga zakatnya dengan menggunakan kambing yang berusia 2 tahun.

Tabel 2.3

Nishab Kambing dan zakatnya

Nishab	Zakatnya
40 s.d. 120 kambing	1 kambing betina usia 24 bulan
121-200 kambing	2 kambing betina usia 24 bulan
201- 300 kambing	3 kambing betina usia 24 bulan

Sumber : Qasim Rizal, Tahun 2009

c. Zakat perdagangan

Harta dari perniagaan yaitu harta yang dimanfaatkan untuk diperjualbelikan atau diinvestasikan dengan niat mendapatkan keuntungan. Ciri dari harta perniagaan yaitu harta tersebut dapat berkembang selalu. Para ulama mewajibkan untuk mengambil zakat dari harta perniagaan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS Al- Baqoroh (2) : 267

d. Zakat Rikaz

Rikaz merupakan berasal dari kata dasar *aar-razku*, yaitu sesuatu yang ada dan didalam bumi harta rikaz dapat diartikan harta barang tambang ataupun harta yang didapatkan secara terpendam. Secara istilah harta rikaz merupakan harta yang didapatkan walaupun tak mengeluarkan biaya dan tak banyak bekerja. Harta *rikaz* juga dapat dicontohkan sebagai emas perak dan lain-lain ataupun benda berharga lainnya.

Secara umum tak ada besarnya jumlah minimal harta rikaz, jumlahnya harus setara dengan 20 % dari total harta yang didapatkan. Jadi jika kita mendapatkan harta rikaz maka kita wajib mengeluarkan 20% dari total yang kita temukan.

e. Barang Tambang (*al-ma'din*)

Al Mad'in dapat diartikan tinggal ataupun menetap. Zakat berupa barang tambang wajib dikeluarkan pada saat mendapatkan hasil tambang tersebut. Jumlah ketentuan zakat barang tambang yaitu 20 dinar emas atau seberat 85 gram emas.

f. Zakat Pertanian

Zakat pertanian yaitu adalah zakat yang dikeluarkan saat panen tiba berupa kebutuhan pokok misalnya umbi-umbian ataupun buah dan juga sayur. Secara umum zakat pertanian diseskripsikan dalam QS Al-An'am (6) ayat 141

Zakat Pertanian yang harus dikeluarkan dapat dibedakan menjadi 2 jenis yakni *Pertama*, tanaman yang tanaman yang hanya dialiri air hujan dan tak mengeluarkan biaya yang lain maka wajib membayar zakat sebesar 10 % dari hasil panen tersebut. *Kedua*, tanaman yang menggunakan dialiri dengan air sumur dan dengan menggunakan pompa pompa maka wajib membayar zakat sebesar 5 %.

g. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan atas pendapatan jika telah mencapai jumlah tertentu dan dalam waktu satu tahun. Zakat profesi menurut fatwa MUI no 3 tahun 2017 yakni zakat yang dibayarkan pada setiap pendapatan, profesi tersebut haruslah bersifat halal dan juga rutin⁶⁶. Jadi, harta profesi harta yang didapatkan harus dengan cara-cara yang benar sesuai syariat Islam misalnya profesi PNS, BUMN dll. Untuk zakat profesi ulama sepakat harus dibayarkan zakatnya sebesar 2,5 % Dari total yang didapatkan.

h. Zakat Investasi

Zakat Investasi dapat dijelaskan sebagai zakat sewa menyewa ataupun investasi lainnya yang produktif dengan cara yang halal besarnya zakat investasi sama dengan zakat pertanian yakni sebesar 2.5 %

E. *Mustahiq Zakat*

Para ulama telah sepakat bahwa *mustahiq* zakat merupakan 8 golongan sesuai dengan QS at- Taubah ayat 60 yang memaparkan tentang 8 kategori orang yang berhak untuk menerima zakat⁶⁷, yaitu :

⁶⁶ Meida Maya Putri *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Prefensi PNS membayar zakat profesi di BAZNAS* (Bogor : IPB 2016) Hal 11

⁶⁷ Tengku Muhammad Hasbi AS-siddik *Pedoman Zakat* (Semarang : pustaka riski putra 2008) hal 19

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*

1. Fakir

Fakir merupakan orang yang tak memiliki harta serta tidak ada mata pencarian.⁶⁸ Fakir ini seseorang yang sengsara hidupnya. Tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kategori fakir miskin yang berhak menerima zakat diantaranya anak yatim yang tidak memiliki harta waris yang cukup, para lanjut usia, korban bencana alam dan juga gelandangan.⁶⁹

2. Miskin

Miskin merupakan seseorang yang tidak berkecukupan walaupun dia memiliki pekerjaan tetapi hasil yang dia dapatkan tak mencukupi kebutuhannya. Secara umum miskin merupakan seseorang yang masih harus bersusah payah dalam mencukupi biaya kehidupannya sehari-hari.⁷⁰

⁶⁸ Abdullah *Panduan Menyempurnakan Zakat* (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa 2001) hal 101

⁶⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor *Konsep Distribusi dalam Ekonomi islam dan Format Keadilam di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2013) hal 237

⁷⁰ Dwita Darwati *Potensi Pengumpulan zakat dan permasalahannya* (Purbalingga : Al Tiraj Vol 1 no 2 2016) hal 141

3. *Amil zakat*

Amil zakat merupakan seseorang yang memperoleh tanggungjawab untuk mengumpulkan data atau membagikan zakat atau golongan yang terlibat dengan pengurusan zakat. Qur'an telah memberikan mereka hak untuk memperoleh upah dari kegiatan pengumpulan, pencatatan dan pendistribusian zakat. *Amil* berhak memperoleh peruntukan tertentu dari hasil pungutan zakat sebagai gaji.

4. *Muallaf*

Muallaf secara harfiah merupakan orang yang baru mempelajari agama Islam. Jadi Mualaf yaitu seseorang yang dilunakan hatinya untuk tetap istiqomah mencintai agama Islam. Hal ini dikarenakan Iman seseorang yang baru mempelajari agama Islam masih sangat lemah. Golongan muallaf harus diperhatikan karena golongan muallaf ini telah mendapatkan keistimewaan dari Allah. Penetapan golongan muallaf ini sebagai Reward kerana mereka memilih jalan yang benar.⁷¹

5. *Riqab* (budak)

Riqab yaitu perbudakan atau orang dengan status budak. Dalam keadaan saat ini, akan sangat sulit menemukan para budak seperti zaman dahulu. Menurut Yusup Qardawi memaparkan bahwa seseorang ataupun negara yang dijajah juga dapat disebut budak pada saat ini. Dengan demikian zakat dalam kategori *riqab*

⁷¹ Mahmood Zuhdi Abd Majid *Pengurusan Zakat* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), hal 427

yaitu zakat yang bertujuan untuk mengupayakan kemerdekaan ataupun seseorang danjuga kelompok yang tertindas ataupun kehilangan haknya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.⁷²

6. *Gharimin*

Gharimin yaitu seseorang yang memiliki hutang. Hutang ini disebabkan oleh terdesaknya kepentingan hidupnya, seseorang yang berhutang juga yang masuk ke kriteria *gharimin* merupakan seseorang yang tak mampu membayar hutangnya dan hutang itu bukan hutang untuk perbuatan tercela

7. *Fi Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Fi Sabilillah merupakan seseorang yang sedang berjuang di jalan Allah yang bertujuan untuk kepentingan umat. Dana zakat dapat didistribusikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kualitas dan dapat bersaing secara global.

8. *Ibnu Sabil* (orang yang dalam perjalanan)

Ibnu Sabil merupakan orang yang kekurangan perbekalan ketika sedang dalam perjalanan. Perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat dan hal tercela. Dalam hal ini orang-orang yang terlantar masuk dalam kategori *ibnu sabil*.

⁷² Ascarya Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta : Raja grafindo Persada 2008) hal 9

F. Hikmah membayar zakat

Didalam Al Qur'an dan juga Hadis ditemui beberapa hikmah dengan membayar zakat antara lain.

1. Zakat bertujuan agar harta dapat terjaga, harta terjaga dari para pencuri sebagaimana hadis nabi yang artinya “Peliharalah harta yang kalian miliki dengan membayar zakat, lalu obatilah orang yang sedang sakit dengan membayar sedekah serta persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka”(HR. Thabrani dan Abu Nu'aym)
2. Pembayaran dana zakat juga bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu. Program ini diharapkan dapat memacu mustahiq untuk bangkit dan memiliki usaha sendiri. Program pemberdayaan zakat dapat dilaksanakan dengan pemberian modal usaha warga. Zakat juga bertujuan untuk membantu fakir dan seseorang yang membutuhkan. Dengan demikian zakat dapat memacu seseorang untuk bekerja lebih giat.⁷³
3. Zakat juga bertujuan untuk menyucikan jiwa dari penyakit bakhil, zakat bertujuan untuk melatih seseorang untuk menjadi seseorang yang baik dan pemberi. Seseorang yang membayar zakat diharapkan mampu untuk mewujudkan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk pengetasan ekonomi dan mengangkat semua derajat umat manusia.
4. Zakat juga diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang dan dapat mengembangkan harta, bukan sebaliknya. Dideskripsikan di dalam QS

⁷³ Kholiq, Abdul. *Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kita Semarang*. Ristek Vol. 6 No. 1 2012 hal 39-47

Al-Baqarah ayat 276 yang artinya: “.... Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan (harta) sedekah.” Sedekah dan zakat dapat menjadikan kekayaan seseorang tumbuh harta tersebut tidak menumpuk hanya pada satu orang saja.

G. Minat Membayar Zakat

1. Definisi Minat

Minat menurut bahasa (etimologi) adalah kecendrungan hati pada suatu keinginan.⁷⁴ Secara istilah, minat adalah bentuk keinginan, kesukaan dan kemaun pada sesuatu hal.⁷⁵ Minat adalah kecendrungan jiwa yang menetap kepada diri seseorang dan biasanya disertai perasaan senang.⁷⁶ Minat adalah rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Pada dasarnya minat merupakan penerimaan pada hubungan antara pribadi sendiri atau internal kepada pihak lingkungan.

Crow menjelaskan bahwa minat sangat erat kaitannya dengan dorongan kepada seseorang dalam mencapai keinginan orang tersebut. Jadi minat dapat dijelaskan sebagai kecendrungan hati seseorang pada hal yang ia sukai. Minat juga Dapat dijelaskan sebagai partisipasi kegiatan tertentu. Minat tak akan diperoleh sejak lahir, tetapi didapatkan melalui proses.⁷⁷

⁷⁴ WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka 1984) hal 1134

⁷⁵ Monier Williams *A Sanskrit English Dictionary* Cet. I (Oxford University Press 1999) hal 21.

⁷⁶ Muhammad Fathurohman *Belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta : Teras 2012) hal 173

⁷⁷ Djali, *Psikologi pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2013), hal .121.

Definisi minat secara umum sudah banyak dikemukakan oleh ahli diantaranya pandangan minat menurut Hilgar. Definisi minat menurut pandangan Higlar yaitu segala bentuk proses yang berfokus dan konsen terhadap apa yang telah dia pilih dengan hati yang senang dan nyaman menikmatinya.⁷⁸ pandangan slameto juga mendefinisikan minat sebagai kumpulan dari harapan dan perasaan untuk menuju terhadap sesuatu yang dia harapkan.⁷⁹ Kemudian minat juga didefinisikan menurut ahli yang bernama Sutarno minat merupakan kecondongan hati kepada sesuatu yang membuat dia senang dan bahagia dalam melakukan sesuatu.⁸⁰ Minat adalah kumpulan aspek psikologis yang memiliki dampak secara langsung serta sumber informasi yang menuju orang tersebut untuk bertindak sesuai apa yang dia inginkan.⁸¹ Dari beberapa definisi tersebut minat dapat disimpulkan yaitu sebagai keterkaitan hati terhadap sesuatu hal yang membuat perasaan senang dan puas jika melakukannya.

Minat dapat membuat orang untuk mengerjakan sesuatu yang ingin dia capai karena terdapat suatu alasan atau dorongan bagi seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan sesuatu.⁸²

⁷⁸ Hilgar, *Entrepreneurship and The New Vanture Formation*, (terjemahan), (Jakarta: Erlangga, 2004), hal 59.

⁷⁹ Maprare dan Slameto, *Essentials of Entrepreneurship and Small Bussiness Management*, NJ: Person Education, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hal. 62.

⁸⁰ Sutarno *Minat Menjadi Wirausaha Dalam Usaha Kecil Menengah* (Bandung: Sinar Baru, 2003) hal 29.

⁸¹ Umar Husein *Menejemen riset Pemasaran* (Jakarta : PT gramedia pustaka 2011) hal 45

⁸² Frederickson, N., Miller dan A cline “ *Educational Psycology*” Educational Psycology 77. hal 41-64

2. Jenis Minat

Berdasarkan cara dalam menyatakannya, minat dapat dikelompokkan dalam empat kategori yaitu

a. Expressed interest

Minat yaitu sesuatu yang dikatakan dengan melalui berbagai aspek. Aspek tersebut dapat dilakukan dengan cara menggambarkan semua kegiatan yang menjadi kegemaran dan yang tidak disukai.

b. Manifest interest

Minat adalah sesuatu yang diumumkan dengan langkah-langkah melakukan pengamatan kepada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan seseorang untuk mengetahui yang menjadi kesukaannya.

c. Tested interest

Minat adalah sesuatu yang disampaikan dengan langkah-langkah tertentu untuk menyiapkan jawaban yang maximal.

d. Inventoried interest

Minat yaitu segala bentuk yang disampaikan dengan langkah-langkah yang telah distandarkan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang yang menjadi responden. Seluruh aspek minat memiliki aspek yakni aspek kognitif dan juga aspek afektif. Aspek kognitif merupakan suatu konsep yang akan dikembangkan tentang apa yang menjadi kesukaan seseorang. Dan

aspek afektif berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi pada diri dari

3. Fungsi Minat

Menurut pendapat Nuckols dan Banducci yang diambil oleh Elizabeth B. Hurlock mengemukakan yang berkaitan dengan fungsi minat adalah sebagai berikut:

- a. Minat dapat mendeskripsikan daya tarik seseorang.
- b. Minat adalah kekuatan pendorong yang sangat efektif
- c. Pencapaian berkaitan langsung dengan minat yang diambil.
- d. Minat dapat menimbulkan kepuasan hati

4. Faktor yang membuat berkembangnya Minat

Pandangan Crow yang terdapat dalam buku Abdul Rahman Saleh mengatakan faktor yang dapat memacu minat, yakni :

a. Dorongan dari diri

Rasa penasaran menimbulkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang baru dan berbeda. Faktor dorongan dalam yaitu persepsi seorang mengenai diri sendiri, harga diri, harapan pribadi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan.

b. Motif sosial

Minat dapat menimbulkan rasa untuk kebangkitan aktor minat dalam melaksanakan suatu kegiatan.

c. Faktor emosional

Minat memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan emosi di dalam diri

5. Minat dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Alquran, yang berhubungan dengan minat ada didalam surat kesatu yang diartikan untuk kita membaca. Maksudnya adalah membaca seluruh aspek didalam kehidupan ini, membaca dan melihat pengetahuan yang ada di dunia serta membacayang ada di dalam diri sendiri. Dengan membaca potensi diri diharapkan dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan kita atau kecendrungan hati kita. Allah SWT berfirman yang terdapat di dalam QS Al-Alaq ayat 3-5

أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Artinya: “Bacalah! Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemberi, yang mengajar dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tak diketahuinya-Nya”⁸³

Dengan demikian minat ialah anugerah yang diberikan allah kepada hambanya. Dengan potensi yang diberikan oleh Allah SWT kepada membuat kita berdiam diri dan berangapan bahwa potensi tersebut dapat berkembang sendiri. Akan Tetapi potensi yang kita miliki harus ada upaya efektif agar potensi yang merupakan anugerah Allah tersebut dapat berkembang dan bermanfaat bagi kemashalatan umat.⁸⁴

Rasa yang kurang percaya pada amil secara umum dapat menyebabkan beberapa masyarakat cendrung untuk membayarkan zakat secara langsung kepada pihak yang membutuhkan dari pada lembaga yang ada. Oleh sebab itu agar masyarakat lebih tertarik dan berminat

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014), hal. 597

⁸⁴ Hikayah Azizi, *Journal of Islamic Business and Economics*, (Desember 2008), Vol. 3 No.2, hal 76-77

menyalurkan zakatnya maka langkah kongkrit yang harus dilakukan amil zakat dengan bekerja lebih profesional, amanahserta transparan. Hal tersebut dapat memacu tumbuhnya semangat masyarakat dalam dalam membayarkan zakat mereka kepada lembaga amil zakat.

Minat masyarakat muslim tentang sistem membayar zakatsangat mempengaruhi dari aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh secara langsung pada ketertarikan hati untuk menyalurkan zakat. Dalam hal inizakat dapat mengetaskan masyarakat miskin dan terjadi distribusi dalam pemerataan secara langsung. Pemanfaatan zakat yang profesional dapat membuat lembaga amil menjadi pilihan pokok muzzaki dalam membayar zakat dan mengajak serta orang agar dapat membayar zakat di lemabga.

H. BAZNAS

Amil merupakan seseorang yang diberikan amanat yang bertujuan untuk melakukan pengumpulan zakat dan diberikan kepada yang membutuhkan. Para ulama mendefinisikan amil dengan berbagai pendapat. Pandangan Hafidhuddin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat yaitu sesuatu yang melakukan seluruh aktivitas tentang pengurusan zakat yakni pengumpulan zakat dari *muzzaki* dan di distribusikan kepada seseorang yang berhak nuntuk mendapatkan dana zakat tersebut. Amil juga berfungsi untuk melakukan perhitungan masuk dan juga keluarnya uang zakat.⁸⁵ Sedangkan pandangan Sayyid Sabiq mengatakan bahwa amil zakat merupakan seseorang yang diangkat pemerintah untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan

⁸⁵ Didin Hafidhuddin *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani 2002) hal 127

pengumpulan zakat dari *muzzaki* dan amil juga didefinisikan orang yang melakukan tugas mulia untuk melindungi dana zakat.⁸⁶

Tujuan dibentuknya BAZNAS adalah untuk mengelola dana zakat bersekala Nasional,⁸⁷ yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸⁸ Yang bertujuan untuk menunjang kesuksesan untuk mengelola dana zakat berdasarkan UU RI No 23 tahun 2011 jadi terbentuklah BAZNAS. BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan dana zakat secara nasional.

I. Akuntabilitas

1. Konsep Akuntabilitas

Teori Asimetri informasi merupakan teori yang membahas tentang ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi antara pihak manajemen dan pihak masyarakat yang berada diluar manajemen.⁸⁹ Pada hal ini, konsep mengenai akuntabilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan

⁸⁶ Sayyid Sabiq *Fikih Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Cakrawala Publishing 2008) hal 142

⁸⁷ Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 Pasal 1 ayat 7

⁸⁸ Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 pasal 3 ayat a,b

⁸⁹ Jensen, M.C and William , H.M " *Theory Of the Firm : Managerial Behavior, agency cost and owenership structur*" Journal of financial Economics, October 3(4) 1979 , hal 305-360

keuangan memuat semua informasi yang relevan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses segala informasi yang dibutuhkan.

Akuntabilitas penting dalam sebuah perusahaan dan organisasi. Konsep akuntabilitas mulai diperkenalkan sejak sejarah Mesopotamia dengan adanya hukum Hummurabi. Hukum Hummurabi merupakan hukum yang mewajibkan seorang raja mempertanggungjawabkan wewenangnya kepada pihak yang berwenang.⁹⁰ Selama 20 tahun terakhir telah terjadinya peningkatan tuntutan akuntabilitas pada organisasi. Peningkatan tuntutan untuk akuntabilitas disebabkan karena adanya serangkaian skandal yang telah mengikis kepercayaan publik.⁹¹ Krisis kepercayaan publik disebabkan karena kurangnya akuntabilitas organisasi.⁹² Contoh kasus yang terjadi dinegara Amerika terjadinya skandal oleh organisasi besar bernama *American Red Cross*. ARC melakukan tindak Kecurangan dengan memberikan upah yang besar kepada pihak yang mengelola organisasi dengan biaya yang tanggung oleh pihak organisasi. Upah yang sangat tinggi tapi tak adanya kontribusi menyebabkan lemahnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pengelola.⁹³

⁹⁰ Velayutham,S. And M.H.B Perera. “ *The Influence of Emotion and culture on Accountability and Governance* “ Corporate Governance 4(1) 2004 hal 52-64

⁹¹ Ebrahim, A *Accountability In Practice : Mechanisms For NGOs*” Word Development 31(5) 2003. hal 813-829

⁹²Gibelman, M., dan Sheldon R. Gelman “ *Very Public Scandals: Nongovernmental Organizations In Trauble*”. International Journal Of Non profit and Voluntary Sector Quarterly .12(1) 2001. Hal 49-66

⁹³ Krishan, Ranjani, Micheal H. Yetman “ *Expense Misreporting In Nonpropit Organisations*” , The accounting Review 2006 Vol 81 No 2

Permintaan akuntabilitas publik lebih sering digunakan untuk kontrol manajerial. Para pengelola organisasi harus tunduk pada akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial secara umum yaitu pengelola harus menjelaskan, dan bertanggung jawab atas semua peristiwa atau perbuatan yang dilakukannya.⁹⁴

Akuntabilitas timbul dikarenakan adanya pengaruh diantara pihak *agent* dan pihak *principal*.⁹⁵ Pengaruh akuntabilitas dibedakan menjadi tiga yang berhubungan dengan tiga komponen saling terikat, yaitu *agent* (*accountor*), *principal* (*accountee*), serta aturan (*code*). *Agent* yaitu salah satu pihak yang diberi amanah untuk menyediakan penjelasan atas amanat yang diberikan kepadanya (pihak pengelola). *Principal* (*accountee*) merupakan suatu mempercayakan amanat kepada pihak pengelola dan dapat menjatuhkan sanksi apabila tindakan tidak sesuai dengan ekspektasi pihak *principal*. Aturan (*code*) merupakan suatu landasan akuntabilitas yang dapat memberikan batasan-batasan pada sifat akuntabilitas serta harapan-harapan umum yang berkaitan pengelola ataupun Sumber daya dalam perusahaan.⁹⁶ Inti dari akuntabilitas merupakan pemberian batasan antara kedua pihak, yaitu pihak *agent* dan *principal*.⁹⁷

⁹⁴ Messner, M. "The Limits Of Accountability" Accounting Organizations and Society 34 2009. Hal 918-938

⁹⁵ Masyah Kholmi "Akuntabilitas dalam perspektif teori Oagensi" Ekonomika- Bisnis, Vol 2 No 2 Juni 2010 hal 357-370

⁹⁶ Gray, A. and Bill, J. "Codes of accountability in the new Public Sector". Accounting, Auditing, and Accountability Journal 6 (3) 1993. Hal 52-67.

⁹⁷ Gray, R., Dave O., Evans, R. and Zadek, S.. "Struggling With the Praxis of Social Accounting; Stakeholders, Accountability, Audit, and Procedures". Accounting, Auditing, and Accountability Journal 10 (3) 1997 hal: 325-364

Akuntabilitas timbul sebagai adanya hubungan antara *Agent* dan *Princial* (*Agen Principal Relationship*). *Principal* dalam hal ini memberi kewenangan penuh pada *Agent* untuk melakukan aktivitas operasional organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang itu maka *agen* harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya terhadap *principal*.⁹⁸ Hubungan berdasarkan konsep *agent* dan *principal* dalam ilmu akuntansi disebut dengan *agency theory* yang melihat korelasi antara *Agen* dan *Principal*.⁹⁹

Terdapat beberapa keterbatasan kerangka konseptual pada *prinsipal agen* yang berhubungan dengan akuntabilitas ketika *agency theory* diterapkan pada organisasi yaitu *Pertama* permasalahan yang muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan antara *agen* dan *principal*. Tak adanya kesamaan kepentingan tersebut mengakibatkan *agen* melakukan pembohongan yang data organisasi yang mengakibatkan kinerja yang dihasilkan kurang akuntabel. Masalah selanjutnya adalah disebabkan akibat informasi yang kurang jelas (*information asymmetry*). Dalam pemafaran informasi, permasalahan yang muncul adalah terjadinya perbedaan sikap antara pihak pengelola dan pihak *Agen*.¹⁰⁰

⁹⁸ Iwan Triuwono *Konsistensi Praktik sistem pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis* Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol 3 No 2, 2000

⁹⁹ Power, M, "Auditing and, environmental Expertise: Between protest and proffesionalisme". Accounting, Auditing, and Accountability 4 (3) 1991 hal: 30-42

¹⁰⁰ Abdurrahman, Y dan Unti, L. "Dekonstruksi Nilai-nilai *agency theory* dengan nilai-nilai syari'ah: suatu upaya membangun prinsip-prinsip akuntansi yang bernafaskan Islam". Makalah Simposium Sistem Ekonomi Islam II, Malang 28-29 Mei. 2004

Ketidakharmonisan yang terjadi antara pihak pengelola dan pemberi amanat dapat mengakibatkan *information asymmetry*.¹⁰¹

Akuntabilitas menyatakan bahwa *prinsipal* mempunyai hak terhadap pengelola yang pertama hak memperoleh informasi dan hak untuk menjatuhkan sanksi jika kinerja yang dilakukan kurang memuaskan, hak yang selanjutnya adalah hak untuk merubah keputusan pihak pengelola, dan juga dapat memberikan batasan kekuasaannya (*deauthorize the agent*); pihak agen dapat juga memberlakukan denda.¹⁰²

Agen harus bersikap akuntabel terhadap *prinsipal*, karena agen memiliki tanggung jawab yang harus melakukan kewajibannya kemudian pihak pemberi amanat harus memberikan penghargaan (*reward*) terhadap pekerjaan yang dilakukan agen jika pekerjaannya memuaskan dan memberi hukuman (*punish*) jika pekerjaannya kurang memuaskan.

Akuntabilitas mulanya bertujuan untuk melengkapi demand yang berkaitan dengan kegiatan yang pengelola terhadap kinerjanya yang akan diberikan kepada pihak yang memberikan kepercayaan. Teori dasarnya berawal dari teori *Agency theory* yaitu teori penyelesaian konflik karena adanya perbedaan pendapat antara

¹⁰¹ McDonald, C. "The Liability of Non Profit to Donor". Nonprofit Management and Leadership. 8 (1), 1997 hal 51-64.

¹⁰² Strom, K. "Parliamentary Democracy As Delegation and Accountability". 2002 <http://www.ccr.uea.ac.uk/papers/Strom.pdf>.

kedua belah pihak.¹⁰³ Konsep akuntabilitas ini agar para pengelola lebih efektif dalam menjalankan kegiatannya dalam rangka mendapatkan hasil yang dapat dipercaya semua pihak. Akuntabilitas juga sangat mempengaruhi keseriusan dalam suatu organisasi, organisasi yang menerapkan akuntabilitas cenderung lebih terarah dan menjadi lebih jelas.¹⁰⁴ Menurut ilmu akuntansi tujuan dari adanya akuntabilitas bertujuan agar tersedianya informasi contohnya adalah informasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan meliputi perhitungan-perhitungan yang dibutuhkan dari seluruh kegiatan organisasi.¹⁰⁵

KNKCG menyatakan bahwa pihak organisasi harus mempertanggungjawabkan hasil dari pekerjaannya secara baik. Dengan demikian organisasi harus dikelola dengan terarah serta sesuai dengan tujuan organisasi tersebut dengan tetap melihat kepentingan banyak pihak. Akuntabilitas juga salah satu syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik. Landasan dari akuntabilitas yakni Accountability sistem *internal checks and balances* didalamnya terdapat praktik audit serta tercapainya pengawasan yang efektif berdasarkan pada keselarasan antara pemegang saham, komisaris dan juga pihak eksekutif.

¹⁰³ Abdurrahman, Y. Dan Unty, L. “ Dekonstruksi Nilai-nilai Agency theory dengan nilai-nilai syariah : Suatu upaya membangun prinsip-prinsip akuntansi yang bernapaskan islam ” Makalah simposium sistem ekonomi islam II Malang 28-29 mei 2004

¹⁰⁴ Sri Fadhilah *Penerapan Good Corporate Governance Pada Lembaga amal zakat* (Bandung : Unpad Press 2012)

¹⁰⁵ Gray, R., Dave O., Carol A. *Accounting & Accountability: Change and Challenges in Corporate Social and Environmental Accounting*. Prentice Hall Britain 1996

Akuntabilitas sangat berkaitan dengan langkah untuk mengendalikan *agency problem* menimbulkan antara pemegang saham dan dewan direksi serta pengendaliannya dilakukan oleh komisaris. Akuntabilitas mendapatkan implememntasi untuk memacu seluruh bagian-bagian perusahaan dapat melakukan tanggung jawab, wewenang dan hak kewajibannya secara baik dan juga bijaksana. Accountability berdasarkan pada suatu pihak internal *checks and balances* terdiri dari praktik audit yang baik serta diperoleh dengan langkah-langkah yang pertama pengawasan yang efisien berdasarkan keseimbangan hubungan antara pihak agen dan principal

Akuntabilitas juga dapat disebut dengan sesuatu untuk memaparkan kinerja badan hukum di dalam pihak organisasi kepada pihak yang memberikan amanah yang bertujuan untuk meminta keterangan-keterangan dan juga pertanggungjawaban. Sehingga masyarakat dapat menilai terkait organisasi tersebut bersifat akuntabel atau tidak. Masyarakat juga mengharapkan adanya transparasi dalam penyelenggaraan suatu entitas publik. Adanya Audit independen merupakan salah satu bentuk dari usaha LAZ dalam menyelenggarakan kegiatan yang akuntabel.

2. Macam-Macam Akuntabilitas

Menurut *American accountimg* dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu akuntabilitas terhadap sumber daya financial, Kepatuhan terhadap aturan hukum, Efisiensi kegiatan dan

efektivitasnya pencapaian tujuan.¹⁰⁶ Sedangkan Pendapat J.D. Stewart menjelaskan tentang akuntabilitas dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis yaitu¹⁰⁷ :

- a. *Police Accountability* yaitu akuntabilitas berdasarkan pilihan yang telah dipilih
- b. *Program Accountability* yakni akuntabilitas berdasarkan sesuatu yang telah diperoleh
- c. *Perpormance Accountability* yakni akuntabilitas berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan.
- d. *Proces Accountability* yakni akuntabilitas dengankriteria proses yang telah ditetapkan standarnya.
- e. *Probility and legality accountability* Akuntabilitas yang ditetapkan berdasarkan dengan aturanyang berlaku.

3. Asas-Asas Akuntabilitas

Supaya implementasi akuntabilitas dapat berjalan dengan baik maka, organisasi harus mempertimbangkan asas-asas yakni

- a. Menerapkan komitmen bersama untuk dapat mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya komitmen itu dibuat antara pengelola dan juga pekerja
- b. Penggunaan sumber daya harus memperhatikan regulasi yang berlaku.
- c. Mempublish tingkat pencapaian yang telah dicapai.

¹⁰⁶ Ara Sadjiarto “ Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintah “ Jurnal akuntansi dan keuangan vol 2 no 2 November 2003 hal 130

¹⁰⁷ Nico Adrianto Good e- Government : *Transparasi dan akuntabilitas publik melalui e-Governance* ,(Malang : Bayuwidya Publising 2007) hal 23-24

- d. Berorientasi pada visi dan misi yang akan diperoleh.
- e. Jujur, Objektif, Transparan dan Inovatif.¹⁰⁸

Asas akuntabilitas yaitun asas yang menjadi arahan yang diharapkan seluruh kegiatan sesuai dengan mendapatkan hasil akhir yang baik serta hasil yang dibuat tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰⁹ Dengan demikian bahwa asas-asas akuntabilitas harus mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat pihak pengelola untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan kepercayaan.

4. Manfaat Akuntabilitas

Pengimplementasian dari sistem akuntabilitas dalam suatu organisasi diharapkan dapat :

- a. Memupuk kepercayaan masyarakat yang memberikan tanggung jawab pada pihak pengelola
- b. Memacu minat masyarakat agar masyarakat menjadi lebih aktif di dalam organisasi.
- c. Meningkatkan kinerja pihak organisasi menjadi lebih baik
- d. Memacu agar timbulnya Iklim organisasi yang kondusif dapat meningkatkan kedisiplinan.

5. Indikator Tercapainya Akuntabilitas

akuntabilitas dapat terwujud jika telah memenuhi beberapa tahapan yakni :

¹⁰⁸ Sedarmayanti “*Good Governance, Pemerintahan yang baik*” (Bandung : Mandar maju 2012) hal 70-71

¹⁰⁹ Kajian kebijakan *Good Local Governance dalam optimalisasi pelayanan publik* : Suatu evaluasi, implementasi pelayanan terpadu di kabupaten dan kota seluruh Indonesia. (Bandung : PKP2AI-LAN 2007) hal 17.

a. Pada tahap pembuatan keputusan. Beberapa indikator tahap pembuatan keputusan yaitu

- 1) Pembuatan kebijakan harus tertulis dan harus tersedia bagi warga negara yang membutuhkan.
- 2) Pembuatan keputusan telah memenuhi standar dan etika yang berlaku.
- 3) Sasaran kebijakan yang diambil harus sesuai dengan visi misi organisasi serta standar yang berlaku.¹¹⁰

b. Pada tahap sosialisasi kebijakan. Terdapat beberapa indikator yaitu

- 1) Penyebarluasan mengenai suatu keputusan.
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran
- 3) Terdapat akses publik setelah keputusan dibuat.
- 4) Tersedianya Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai¹¹¹.

6. Akuntabilitas dalam Islam

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk Nilai, tata cara dan praktek hidup. Nilai dasar terletak pada pijakan yang paling utama, yakni tauhid artinya keesaan, khilafah artinya perwakilan serta keadilan. Dalam Islam konsep tauhid merupakan pondasi keimanan, yang kemudian mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Konsep tauhid menyadarkan kita

¹¹⁰ Adrian Sutedi *Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah dalam kerangka otonomi daerah* (Jakarta : Sumber Grafika 2009) hal 398-399.

¹¹¹ *Ibid*

bahwa semua yang ada di muka bumi ini hakikatnya adalah milik Allah, bukan milik manusia.

Manusia diberikan kepercayaan untuk dapat memaksimalkan alam yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari dalamnya. Tugas yang dipercayakan kepada manusia hanyalah titipan atau tidak mutlak. Dengan kata lain amanah yang dititipkan kepada manusia harus tunduk kepada ketentuan Allah SWT sebagai pemilik alam semesta. Konsep dalam sistem keadilan harus ditempatkan diposisikan dengan langkah yang tepat, Keadilan akan bisa diperoleh apabila manusia mengikuti aturan yang dibuat oleh Tuhan.

Akibat dari konsep pijakan tersebut menimbulkan adanya pertanggungjawaban manusia, sebagai wakil tuhan. Pertanggungjawaban tersebut akan diberikan kepada Allah, sesama manusia dan juga alam sekitar. Ketiganya saling berhubungan menjadi tiga konsep utuh sebagai simpul bentuk dari pertanggungjawaban kepada Allah. Kemudian setelah pertanggungjawaban kepada Allah maka khalifah harus bertanggungjawab kepada sesama manusia. Dan setelahnya pertanggungjawaban manusia untuk mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹²

Akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu yang ada di kehidupan manusia yang saling terikat antara nilai dan pijakan nilai dasar. Dalam menyusun teori dan juga standar akuntansi sangat berkaitan dengan bentuk pertanggung jawaban.

Akuntabilitas juga disebut sebagai bentuk tanggungjawab pihak pengelola untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui beberapa aspek yaitu penyajian laporan, pengungkapan dan juga pelaporan segala jenis kegiatan yang telah dilakukan pihak pengelola. Islam mempunyai pandangan yakni akuntabilitas sebuah tanggungjawab karena segala sesuatu yang menjadi titipan adalah bentuk amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Tertuang dalam Firman Allah QS al Muddasir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹¹³

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014), hal. 47

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014), hal. 575

Akuntabilitas Laporan Keuangan dapat dipersamakan dengan Sikap pengelola organisasi yang menerapkan Amanah, tertuang dalam Firman Allah SWT dalam QS An Nisa' ayat 58,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Organisasi Pengelola Zakat mutlak harus dapat dipercaya dalam melakukan tugas tugasnya yaitu mengumpulkan, menyimpan serta mendistribusikan dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi BAZNAS harus bisa memaparkan aktivitas-aktivitas transaksi baik dari segi penerimaan, pengelolaan serta pendistribusian dana ZISWAF dari muzaki. Hal ini bertujuan agar muzakki dapat memberikan kepercayaan lebih apada pihak pengelola untuk menyalurkan zakatnya di BAZNAS

Implementasi akuntabilitas harus menjadi perhatian yang memprioritaskan kesejahteraan umat sebagai bentuk mewujudkan amanah amanah yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia yang menjadi seorang khalifah, Aktivitas organisasi harus

¹¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014), hal. 78

berdasarkan sikap yang berlandaskan keadilan dan seluruh kegiatan organisasi tidak mengganggu lingkungan sekitar.¹¹⁵

J. Transparasi

1. Konsep Trasnparasi

Transparansi (*transparency*) menurut bahasa artinya jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Transparansi juga merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.¹¹⁶ Jadi transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan (*openness*) pihak organisasi untuk memberikan sumber-sumber informasi yang yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan sumber daya tersebut.¹¹⁷

Komitmen dalam transparansi yaitu kumpulan prinsip yang memastikan adanya kebebasan pada seluruh orang agar mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan oprasional organisasi yang berhubungan dengan kebijakan mulai dari tahap planing, oprasional dan hasil yang didapatkan. Transparansi menurut Randi R.W adalah semua keputusan yang diambil dan implementasinya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Transparansi dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan kebijakan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk

¹¹⁵ Abu Tapanje, A.M,” *Corporate Governance From The Islamic Perspective: A Comparative Analysis With OECD Principles*, Critical Perspectives On Accounting 2009 20:556-567

¹¹⁶ Arifin Tahir. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (Bandung, Alfabeta 2015), hal. 109.

¹¹⁷ Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, “*Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 9, (November, 2015), hal 3.

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hal ini berhubungan dengan seluruh informasi dapat diakses secara mudah dan langsung oleh masyarakat.¹¹⁸

Menurut Tjokroamidjojo transparansi adalah sesuatu yang diketahui semua pihak berkaitan dengan kebijakan suatu organisasi.¹¹⁹

Menurut Hidayat transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.¹²⁰ Pendapat lain mengenai transparansi dikemukakan oleh Corynata, Menurut Corynata transparansi tumbuh berdasarkan sumber informasi yang didapatkan oleh masyarakat.¹²¹ Menurut Vera Jassini Puteri transparansi adalah informasi relevan yang tersedia untuk manfaat publik secara umum. Dengan demikian aturan dan regulasi pemerintah harus bersifat jelas dan disebarkan kepada masyarakat.

Transparansi dapat memacu timbulnya keterbukaan dalam pengambilan kebijakan terutama yang berkaitan dengan informasi untuk pengguna laporan keuangan. P. De Haan mengemukakan bahwa keterbukaan dalam prosedur memungkinkan masyarakat untuk ikut mengetahui, ikut memikirkan, bermusyawarah, serta ikut

¹¹⁸ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003) hal. 128.

¹¹⁹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, (Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, 2003) hal. 123.

¹²⁰ L. Misbah Hidayat, *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007) hal. 23.

¹²¹ Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, (Februari, 2016), hal. 231.

memutuskan dalam rangka pelaksanaan.¹²² Informasi yang diperlukan merupakan jenis informasi tentang seluruh aspek kebijakan di dalam suatu organisasi yang dapat mudah didapatkan. Dengan adanya transparansi maka diharapkan akan memperoleh kepercayaan *Muzzaki* untuk dapat mengelola dana ZISWAF dengan baik.

Informasi yang baik atau buruk yang dapat mempengaruhi jalannya organisasi harus sampai ke tangan muzaki. Pihak yang wajib menyampaikan Informasi adalah Pihak LAZ dan Akuntan Publik.¹²³ Transparansi merupakan kondisi dimana lembaga memberikan seluruh Informasi dengan langkah yang mudah dijangkau oleh seluruh yang memiliki kepentingan.¹²⁴

Informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan juga tepat waktu.¹²⁵ Transparansi pengelolaan zakat, mengacu pada aspek sistem pengawasan yang memiliki sinergi dengan baik, hal ini disebabkan karena terdapat pihak intern organisasi, pihak muzakki dan juga masyarakat yang menjadi bagian pusat controlling. Transparansi juga dapat meminimalisir prasangka buruk pada organisasi

KNKCG yang bertujuan menjaga obyektivitas, Organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara

¹²² Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung, PT Alumni, 2011) hal. 231.

¹²³ Mohamad Samsul *Pasar Modal dan Manajemen Portopolio* Edisi 2 (Jakarta : Erlangga 2015) hal 76

¹²⁴ KNKG, *Pedoman Umum Good Corporate Governance* (Jakarta : Komisi Nasional kebijakan Governance 2002)

¹²⁵ Sri Fadhilah *Penerapan Good Corporate Governance Pada Lembaga amal zakat* (Bandung : Unpad Press 2012)

yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Beberapa riset yang dikembangkan dalam rangka pengoptimalan transparansi yaitu pihak organisasi harus mengungkapkan transaksi yang berkaitan dengan aktivitasnya, dan rencana/kebijakan yang akan dijalankan.

Transparansi mempunyai makna dalam penyelenggaraan organisasi, yaitu Salah satu wujud pertanggungjawaban pengelola kepada *muzzaki* dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan organisasi yang baik. Sultan Hamengkubuwono X mengatakan transparansi dapat memacu pelayanan penyelenggaraan administrasi publik yang bersifat akuntabel, kemudian transparansi juga akan mampu meningkatkan partisipasi publik.¹²⁶

Kriteria transparansi menurut Kristianten dalam perencanaan dan penganggaran dapat diukur melalui adanya ketersediaan dokumen negara. Dokumen mengenai penggunaan anggaran tersedia di kantor pemerintahan dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi. Selain itu dokumen tentang penganggaran harus jelas dan informasi mengenai penggunaan anggaran haruslah lengkap. Setiap proses mengenai penganggaran haruslah terbuka bagi masyarakat dan tersedianya regulasi yang menjamin adanya transparansi sehingga tidak terjadi adanya penyelewengan terhadap penggunaan anggaran.¹²⁷

Transparansi Lembaga Amil zakat dapat disimpulkan dengan adanya keterbukaan pihak organisasi sebagai pembuat, pelaksana serta

¹²⁶ Sultan Hamengkubuwono X, *Merajut Kembali ke Indonesia Kita* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2007), hal 230.

¹²⁷ Iqsan, “*Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, (Februari, 2016), hlm. 232

penanggung jawab dari segala macam kebijakan yang dibuat yang bertujuan untuk kemajuan mustahiq dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya. Transparansi dalam hal ini pemerintah memberikan akses yang jujur dan benar kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Seluruh masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan anggaran sebab hal tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat dalam menyalurkan zakatnya ke Lembaga Amil Zakat.

Pelaksanaan asas transparansi oleh pihak amil diperlukan agar dapat tercapainya organisasi yang baik dan juga agar masyarakat dapat percaya sepenuhnya terhadap pelaksanaan organisasi itu sendiri. Organisasi yang baik sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.

Transparansi berkaitan erat dengan seluruh kualitas informasi yang diberikan pihak organisasi. Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan informasi yang diberikan pihak pengelola. Pihak pengelola diwajibkan untuk memperoleh seluruh informasi yang jelas, akurat, tepat waktu. Maka informasi yang diberikan kepada publik harus

memiliki aspek terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu. Hal ini akan meningkatkan kinerja pelayanan publik

2. Asas-Asas Transparasi

- a. Setiap informasi harus mudah diakses publik secara sederhana
- b. Adanya keterbukaan informasi yang jujur dan tidak diskriminan
- c. Memberikan informasi yang cepat tepat kepada pihak yang membutuhkan informasi¹²⁸

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa transparasi meliputi keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi dengan waktu yang cepat

3. Tujuan Transparasi

- a. Dengan adanya kontrol sosial maka mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- b. Menghindari perbedaan persepsi antara pengelola organisasi dan masyarakat.
- c. Mendorong masyarakat belajar bertanggungjawab terhadap pilihan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Terciptanya kinerja yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Werren mengungkapkan bahwa tujuan adanya transparasi yaitu untuk menambah rasa kepercayaan dan hubungan antara pengelola dan pemangku kepentingan menjadi semakin baik.¹²⁹

¹²⁸ Nico Adrianto Good e- Government : *Transparasi dan akuntabilitas publik melalui e-Governance* ,(Malang : Bayuwidya Publising 2007) hal 20

4. Manfaat Transparasi

- a. Mengetahui sesuatu yang menjadi kekurangan dan kelebihan perusahaan
- b. Memacu sistem menjadi lebih akuntabel sehingga kinerja yang didapatkan menjadi optimal
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen organisasi dalam menjalankan misinya.
- d. Meningkatkan kohesi sosial antara masyarakat dan pihak organisasi¹³⁰

5. Indikator Transparasi

- a. Komponen yang memastikan adanya keterbukaan dan terdapat standarisasi dalam proses pelayanan.
- b. Langkah-langkah yang memudahkan dalam menjawab pertanyaan publik
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi.¹³¹

6. Transparasi dalam Islam

Transparansi laporan keuangan merupakan sifat terpuji yang disebut dengan Tabligh, sesuai dengan QS Al Maidah ayat 67

¹²⁹ Wereen Bennis , *Bagaimana pemimpin menciptakan budaya keterbukaan terj.* Irene novita (Jakarta: Libri 2009) hal 103

¹³⁰ Nico Adrianto Good e- Government : *Transparasi dan akuntabilitas publik melalui e- Governance* ,(Malang : Bayuwidya Publising 2007) hal 21

¹³¹ Adrian Sutedi, *Impikasi Hukum atas pembiayaan daerah dalam kerangka otonomi daerah* (Jakarta : Sinar Grafika 2009) hal 40

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾



Artinya : Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.¹³²

Dalam ayat tersebut maka dapat diperoleh makna jika organisasi pengelola zakat wajib untuk menjalankan aturan Allah, Selalu memberikan sesuatu secara benar dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, mengerjakan pekerjaan dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

Menurut Abdussalam mohammed Abu tapenje Komponen Transparasidapat dibagi menjadi komponen yakni: Pengelola harus memaparkan kegiatan yang sifatnya terbuka kepada terkait semua fakta tentang pengelolaan zakat. Laporan keuangan harus dapat diakses publik dengan mudah serta disampaikan secara jujur, lengkap yang terkait dengan informasi yang diberikan, Pemberian informasi diberikan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.¹³³ Dengan demikian agar implementasi tolak ukur lembaga zakat disebut transparan sangat erat keterkaitannya dengan kejujuran serta sikap amanah untuk menyampaikan informasi.

¹³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014), hal. 119

¹³³ Abu Tapanje, A.M,” *Corporate Governance From The Islamic Perspective: A Comparative Analysis With OECD Principles*, Critical Perspectives On Accounting 2009 20:556-567

Transparasi akan menimbulkan kepercayaan muzzaki dengan pihak pengelola zakat.

K. Kepercayaan

1. Konsep Kepercayaan

Kepercayaan disebut juga sebagai (*trust* atau *belief*) merupakan kumupulan dari keyakinan bahwa seseorang yang kita percaya dapat melakukan pekerjaanya dengan baik.¹³⁴ Kepercayaan tumbuh melalui proses yang cukup panjang lalu terkumpul menjadi bagian dari kepercayaan. Jadi dapat disebut bahwa kepercayaan bntuk suatu keyakinan, Keyakinan ini lahir disebabkan oleh adanya perasaan yang senang dan puas terhadap suatu pembelajaran dan pengalaman.¹³⁵

Pandangan Kreitner dan Knicki menyatakan kepercayaan yaitu kelompok keyakinan dari pihak tentang sesuatu yang dipercayakan kepadanya .¹³⁶ Jadi kepercayaan sangat terkait dengan keyakinan terhadap pihak lain. Kepercayaan juga memberikan amanat kepada pihak lain untuk mengerjakan tugasnya.¹³⁷ Kepercayaan dapat diesensikan sebagai seluruh keyakinan pada suatu *Integritas*. *Integritas* yaitu bentuk dari kejujuran pihak yangdiberikan tanggungjawan, kemudian *Benevolence*, *benevolence* meruapakan

¹³⁴ Gassenheimer, J.B. and Manolis Chris, "The Influence Of Product Customization and Supplier Selection On Future Intention: The Mediating Effects Of Salesperson And Organizational Trust", Journal Of managerial OIssues XIII, No.4, (2001), 418-435.

¹³⁵ Eko Satrio dan Dodik siswanto *Analisis Faktor kepercayaan, pendapatan pada minat muzzaki untuk membayar zakat penghasilan pada Amil Zakat* (Jakarta : Universitas Indonesia 2016) hal 40

¹³⁶ Kritner, Robert dan Kinichi Angelo, Dalam Sri Fadhillah (*membangun kepercayaan konsumen : Faktor penting Pada Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia* . Jurnal ISSN : No.2089-3590 Vol 13 no 1 tahun 2012)

¹³⁷ Bachmann dan Zaheer, *The Handbook of Trust Research*, (Jakarta: Erlangga, 2006),

bentuk perhatian serta motivasi yang melakukan perintah yang sesuai dengan perintah. Yang ketiga adalah *Competency*, *competensy* yaitu bentuk dari kemampuan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan *Predictability* merupakan adalah konsistensi perbuatan yang dibuat pihak yang dipercaya¹³⁸ McKnight menyatakan elemen yang menumbuhkan *trusting belief*, yaitu *benevolence*, *integrity*, *competence*.¹³⁹

Kepercayaan yaitu komitmen dasar untuk melakukan tugas dan juga kewajiban Morgan dan Hunt dalam Dharmmesta berpendapat bahwa ketika seseorang meyakini bahwa ketika adanya seseorang memiliki keyakinan dan kekonsistenan serta integritas, maka dapat disebut dengan suatu jenis kepercayaan.¹⁴⁰ Kepercayaan merupakan kemauan yang mempunyai seseorang keyakinan bahwa orang lain memiliki kemampuan mengerjakan kewajibannya.¹⁴¹ Kepercayaan yaitu adanya kemampuan bahwa seseorang memiliki integritas yang baik untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Sedangkan kepuasan yaitu suatu bentuk kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kepuasan timbul berdasarkan kepuasan yang dimiliki seseorang atas kinerja yang ditimbulkan.

¹³⁸ Prof Dr. J. Winardi *Manajemen Perubahan* (Bandung : Kencana Prena media Group 2006) hal 990

¹³⁹ McKnight et al., "*The Impact of Initial Consumer Trust on Intention to Transact with a Website: A Trusting Building Model*", Jurnal sistem strategi informasi, 2002, hal 11.

¹⁴⁰ Darsono, L.I. dan Dharmmesta, B.S., "*Kontribusi Involvement dan Thrust in Brand dalam Membangun Loyalitas Pelanggan*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, No 3, Vol 20, 2005. Hal, 27

¹⁴¹ Dwyer, R. F., Schurr, P. H., & Oh, S., "*Output sector munificence effects on the internal political economy of marketing channels*", Journal of Marketing Research, No. 24, (2000), 347-358.

Ketidakpercayaan selaras dengan sedikitnya informasi dalam bagian planing dan controlling suatu kinerja. Rasa kepercayaan ataupun kurang percaya terhadap seseorang dalam tindakan sesuai dengan kondisi kondisi contohnya adalah informasi, pengaruh, dan adanya bentuk pengendalian terhadap suatu hal. Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan informasi yang disalurkan, jika informasi yang diperoleh lengkap maka akan meningkat pula kepercayaan pada masyarakat.

Pada sebuah Teori kepercayaan dapat memicu tumbuhnya minat manusia secara umum. Pandangan ahli yang bernama gambetta, gambetta mengatakan bahwa seorang cendikiawan cenderung menyebutkan bahwa kepercayaan dapat menjadi sebuah landasan dalam dimensi berinteraksi sosial akan memacu munculnya sebuah minat.¹⁴² Taylor seorang ilmuwan juga mengatakan bahwa kepercayaan juga sangat erat kaitannya dengan minat. Kepercayaan saling serta kaitannya dengan hubungan yang muncul dari interaksi sosial yang akan memacu munculnya sebuah minat.¹⁴³ Green yang diambil dari karyanya Fasochah mengatakan jika himpunan-himpunan kepercayaan terdiri dari: adanya suatu bentuk *Kredibilitas* (*Kredibilitas* merupakan bahwa seseorang yang jujur dan juga bisa dipercaya), *Reliabilitas* (*Relibilitas* merupakan sesuatu yang reliable atau dapat diandalkan. Hal ini menyatakan bahwa adanya sesuatu yang baik pada individu ataupun organisasi. Reliabilitas juga mesti diiringi dengan adanya suatu

¹⁴² Gambetta, D.G, *Can we trust trust ?* (New york : Brasil Blackwell 1988) hal 213-237

¹⁴³ Taylor R.G *The Role of trust in labor management relations* Organization development Journal 1988 (7) hal 85-89

tindakan yang nyata. Kemudian *Intimacy* (*Intimacy* yaitu suatu bentuk integritas dengan mempunyai prinsip yang sangat tangguh. Selanjutnya yaitu Integritas, Integritas mengatakan bahwa internal consistency yaitu adanya perasamaantindakan dan juga perbuatan. Yaitu adalah bentuk sikap yang konsistensi antara pikiran serta tindakan.¹⁴⁴

Adanya suatu hal pendukung yang dapat memicu tumbuhnya kepercayaan seseorang menurut ahli yang bernama McKnight et al. Sesuatu yang dapat menumbuhkan kepercayaan yaitu *reputation* atau disebut juga Reputasi menjadi hal mendasar yang harus dibangun untuk memacu tumbuhnya kepercayaan. Selain reputasi yang dapat memicu tumbuhnya kepercayaan juga *perceived quality* atau dapat disebut juga kualitas pelayanan yang baik.¹⁴⁵

Sifat kepercayaan dalam suatu organisasional dapat memacu adanya sifat kepribadian yang positif agar pihak lain dapat memberikan keyakinan yang berlebuhi (*propensity to trust*). Adanya suatu sifat Kecenderungan (*propensity*) terhadap sesuatu untuk memberikan keyakinannya kepada seseorang. Keyakinan dapat memunculkan kepercayaan dalam lingkungan masyarakat Kepercayaan juga sangat mempengaruhi adanya sifat kognitif yang terdiri dari keinginan-keinginan tertentu yang sangat dipengaruhi

¹⁴⁴ Fasochah, "Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Konsumen sebagai variabel Mediasi (Studi Pada RS Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal)", Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, No. 13, (2013), hal 22.

¹⁴⁵ McKnight et al, "Developing and Validating Trust Measures for e-Commerce: An Integrative Typology", Information Systems Research, No. 3, Vol. 13, (September, 2002), hal 334-359.

oleh adanya suatu dasar serta pemikiran dan juga pengalaman yang mupuni.

2. Dimensi Kepercayaan

Kepercayaan seseorang dibentuk melalui 3 dimensi yaitu kemampuan (*ability*), kebaikan hati (*benevolence*), dan integritas (*integrity*).¹⁴⁶ Dimensi tersebut saling terkait satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

a. Kemampuan (*Ability*)

Kemampuan dan kompetensi yang dimiliki organisasi dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, bagaimana organisasi tersebut mampu menyediakan, melayani, sampai mengamankan gangguan dari pihak lain. *Ability* berarti muzaki memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dari organisasi dalam melakukan transaksi. *Ability* meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.

b. Kebaikan hati (*Benevolence*)

Kebaikan hati merupakan kemauan pihak organisasi dalam memberikan kepuasan kepada muzaki. Kim mengatakan bahwa *benevolence* yaitu suatu bentuk perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Mayer, R.C., Davis, J. H., dan Schoorman, F. D., *An Integratif Model of Organizational Trust*, Academy of Management Review, 30 (3) 1995 hal : 709-734.

¹⁴⁷ Kim, Y. H. dan Kim, D. J., *A Study of Online Transaction Self-Efficacy, Consumer Trust, and Uncertainty Reduction in Electronic Commerce Transaction*, Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences.2005

c. Integritas (Integrity)

Integritas sangat dipengaruhi oleh adanya suatu bentuk yang saling berhubungan dengan adanya suatu sikap perilaku ataupun kebiasaan pihak yang dipercaya dalam suatu implementasi organisasi tersebut. Informasi merupakan sesuatu yang harus diperhatikan, hal ini terkait dengan adanya suatu bentuk integrity dapat dipengaruhi oleh (*fairness*), kelengkapan (*fulfillment*), keyakinan (*loyalty*), keterbukaan (*honestly*), hubungan (*dependability*), dan kemampuan (*reliability*).

3. Core values kepercayaan

Untuk memperoleh suatu bentuk kepercayaan harus adanya *core values*, yaitu:¹⁴⁸

a. Keterbukaan

Organisasi harus menerapkan suatu sifat keterbukaan, adanya suatu Kerahasiaan dan adanya tidak transparan dapat menghancurkan *trust building*. Jadi dalam suatu organisasi itu dibutuhkan keterbukaan adanya salah satu bentuk kepercayaan dibangun.

b. Kompeten

Kemampuan dalam mengimplementasikan suatu peran yang dilakukan dalam menumbuhkan suatu bentuk pengetahuan dan juga bentuk keterampilan berdasarkan adanya pengalaman yang

¹⁴⁸ *Ibid.*

terjadi dalam masyarakat. Yakni sesuatu bentuk dari syarat untuk menerapkan sesuatu kewajibannya untuk melakukan adanya pekerjaan tertentu.

c. Kejujuran

Kejujuran yaitu bentuk suatu yang sangat penting dalam komponen kepercayaan. Hal ini dikarenakan karena akan menghindari adanya suatu bentuk kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Kejujuran juga sangat erat kaitannya dengan adanya suatu bermakna keserasian antara pihak. Dengan demikian suatu kejujuran yaitu menyatakan semua informasi yang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Penerapan aspek kejujuran merupakan bentuk kepercayaan jika segala kegiatan yang diperbuat sesuai dengan tata nilai yang berlaku, tidak menyimpang dengan sikap integritas.

d. Integritas

Integritas merupakan bentuk yang sejalan dengan niat, tindakan dan aturan yang berlaku. Dalam prosesnya integritas yakni sesuatu yang sesuai dengan adanya perjanjian akan menerapkan suatu kewajiban yang bersih, transparan, dan juga profesional. Integritas juga disebut dengan adanya suatu langkah perbuatan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik. seseorang yang memiliki integritas yang baik maka dia memiliki sikap yang tulus, jujur, dan memiliki sikap yang konsisten dan

sesuai dengan adanya prinsip untuk dapat mengimplementasikan tugasnya dengan adanya suatu bentuk integritas.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu bentuk langkah objektif dalam mempertanggungjawabkan sesuatu yang diperoleh secara nyata. Akuntabilitas diyakini mampu untuk memberikan adanya suatu bentuk dengan adanya pertanyaan- pertanyaan sesuai dengan adanya bentuk motivasi yang sesuai dengan sesuai usaha (daya pikir) besar untuk dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik.

f. *Sharing*

Sharing merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap sesuatu keyakinan terhadap pihak lain yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. *Sharing* juga sesuatu keyakinan yang sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan karena kepercayaan memiliki manfaat membangun suatu hubungan yang baik antara berbagai pihak. Termasuk beberapa informasi yang sesuai dengan adanya suatu bentuk ketrampilan, pengalaman dan juga keahlian.

g. Penghargaan.

Untuk memacu adanya suatu bentuk keyakinan sesuai dengan kinerja dengan baik saling berhubungan dengan adanya hubungan antara berbagai pihak.

Jadi kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku korporatif berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama.¹⁴⁹ Kepercayaan pada Badan Amil Zakat wujud dari harapan *muzzaki* kepada amil zakat dalam melaksanakan organisasi sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan beralasan, *muzzaki* akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambil sesuai pikiran yang rasional. Persepsi *muzzaki* mengenai kepercayaan pada amil zakat dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan *muzzaki* dalam melaksanakan kewajiban zakat.

Adanya suatu bentuk adanya kepercayaan terhadap informasi *muzakki* dalam menyalurkan zakat yang sesuai dengan adanya kekuatan spiritual, humanistik, ekonomi, dan moral yang bermula dengan adanya motivasi yang tinggi kemudian sesuai dengan adanya pembuktian bahwa tidak semua aktivitas oleh aktivitas yang sesuai dengan adanya faktor ketaatan terhadap agama. Informan dapat memperoleh aktivitas sesuai dengan adanya bentuk konsumsi yang sesuai dengan motivasi yang bersumber dari kekuatan agama. Sesuai dengan keyakinan informan (*muzakki*) dalam memberikan zakat mal, dan menyatakan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan budaya.¹⁵⁰

Kepercayaan memiliki peran penting dalam suatu Badan amil zakat hal ini karena adanya kelangsungan operasional p Badan amil

¹⁴⁹ Handayani, Sapti Wuri, Agus Fathurohman dan Umi Pratiwi. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang menentukan pekerjaan bebas* Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin 2012

¹⁵⁰ Gansir Bachmid dkk. *Prilaku muzakki membayar zakat mal* (Kendari : Jurnal Aplikasi Manajemen vol 10 nomor 2 2012) hal 432

zakat yang bersumber dari terhimpunannya jumlah zakat dari pihak (*Muzzaki*). Selaras dengan pendapat yakni adanya suatu bentuk kepercayaan *muzzaki* memiliki suatu peran terhadap organisasi dikarenakan adanya aktifitas sangat terkait dengan tingkat kepercayaan para *muzzaki*. Kepercayaan sebagai faktor intristic yang ada pada diri *muzzaki* dipandang sebagai faktor penting dalam hal pengaruhnya terhadap minat *muzzaki* membayar zakat pada BAZNAS.

4. Kepercayaan Dalam Islam

Imam Al-Qusairi mendefinisikan kepercayaan berasal dari kata *shadiq* yang berarti seseorang yang memiliki sifat yang jujur atau berasal dari kata *shidq* yakni sebuah kejujuran. Jadi orang tersebut merupakan seseorang yang memiliki sikap jujur. Jika seseorang memiliki sifat jujur maka didalam dirinya terpanncar cahaya kebenaran dan juga dia seseorang bisa dipercaya.¹⁵¹ Sikap kejujuran merupakan suatu sikap yang diiringi dengan tanggung jawab serta semua yang dilakukannya selalu memiliki integritas yang baik. Kejujuran dan integritas merupakan satu aspek yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang harus mempunyai sikap yang mencerminkan keikhlasan dan kejujuran dan dibutuhkan juga integritas yang baik di dalam jiwa seseorang. Hal ini dapat memacu jiwa yang berani dan tidak melemparkan tanggung jawab dengan baik bagi seseorang yang memiliki kepercayaan yang baik.

¹⁵¹ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal, 80

Dalam ajaran agama Islam, korelasi kejujuran dan juga keberhasilan di dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang berkesinambungan. Dalam organisasi yang baik harus didasarkan pada sikap kejujuran karena dengan jujur akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Pangkal mula kejujuran adalah dengan mengimplementasikan sikap amanah. Sikap amanah merupakan cara mempertahankan prinsip dan kemudian bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip amanah merupakan fitrah paling pendasar untuk mendapatkan kepercayaan karena Menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya merupakan ciri seorang profesional yang dapat membentuk kepercayaan.

Allah SWT berfirman tentang sikap terpuji amanah (dapat dipercaya). Sebagaimana surat An- Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*¹⁵²

Dari ayat tersebut memaparkan sikap amanah yaitu segala sesuatu yang diberikan kepercayaan untuk dijaga dan dikembalikan kembali jika pemiliknya telah meminta. Amanah bertolak belakang dengan sifat khianat.

¹⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014), hal. 87

Kepercayaan dapat tercermin dengan adanya sikap (*the spirit of trust*) yang merupakan suatu bentuk semangat yang dapat memacu tumbuhnya kepercayaan. Kepercayaan terdiri dari berbagai aspek yakni langkah untuk melakukan aksi, yang berawal dari aspek melihat, berbicara, berperilaku, dan bekerja. Kepercayaan timbul karena adanya rasa percaya kepada orang lain yang mempunyai kualitas yang baik dan perilakunya tidak berubah-ubah sifat kompeten, memiliki sifat jujur, adil dan bertanggung jawab.¹⁵³

Dalam jiwa kepercayaan mempunyai aspek reliable. Aspek reliable merupakan suatu kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan dalam memberikan jasa dengan baik. Pelayanan dapat dikatakan reliabel jika semua yang dilakukannya dengan akurat. sikap akurat dapat meningkatkan rasa percaya *muzzaki* pada organisasi penyedia layanan jasa. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu menepati janji dan bersikap amanat yang telah dibuat. sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹⁵⁴

¹⁵³ Ika Yunia Fauzia, "Etika Bisnis dalam Islam" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal 25

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Cipta Bagus Sagara 2014), hal. 277

L. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/ judul	Hasil penelitian
1	Seed Awadh Bin Nashwan, Hijatullah Abdul Jabbar dan Saliza Abdul Aziz. ¹⁵⁵ Do Enforcement, Religioosity and peer Influence Zakah Compliance Behavior ?	Berdasarkan hasil penelitian bahwa Religiusitas islam dan kepercayaan ada pengaruh terhadap minat membayar zakat orang-orang yang Religius cenderung patuh dalam membayar zakat. Hasil-hasil ini menunjukan wawasan lebih lanjut tentang kebijakan atau strategi untuk mendorong minat masyarakat membayar zakat misalnya dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat
2	S Martono, Ahmad Nurkin Fatimah Luthfiyah, Ahmad Rofiq dan Sumiadji The Relationship Between Knowledge, Trust, Intention to pay zakah and zakah paying Behavior ¹⁵⁶	Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan kepercayaan memiliki efek positif dan signifikan terhadap minat karyawan untuk membayar zakat kemudian niat untuk membayar zakat tidak berdampak pada perilaku membayar zakat. Oleh sebab itu organisasi zakat harus meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kinerja dan kualitas layanan mereka.
3	Elis Mediawati Analisis Akuntabilitas dan Transparasi laporan	Hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menyalurkan Zakat

¹⁵⁵ Seed Awadh Bin Nashwan, Hijatullah Abdul Jabbar dan Saliza Abdul Aziz *Do Enforcement, Religioosity and peer Influence Zakah Compliance Behavior* International Journal Of Finance Research Vol 10 No 6 2019, hal 42-53

¹⁵⁶ S Martono, Ahmad Nurkin Fatimah Luthfiyah, Ahmad Rofiq dan Sumiadji *The Relationship Between Knowledge, Trust, Intention to pay zakah and zakah paying Behavior* International Journal Of Finance Research Vol 10 No 2, 2019, hal 75-81

	keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung ¹⁵⁷	
4	Indri Yuliantri dan Asma Nur Khoiriyah Pengaruh kepuasan Muzzaki , Transparasi dan Akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzzaki studi pada LAZ Rumah Zakat ¹⁵⁸	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh kepuasan Muzzaki, Transparasi dan Akuntabilitas LAZ terhadap loyalitas <i>muzzaki</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparasi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap loyalitas <i>muzzaki</i> .
5	penelitian yang dilakukan oleh Fery Setiawan dengan judul pengaruh Religiutas, Kepercayaan Dan Reputasi terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat profesi di kabupaten ponorogo ¹⁵⁹	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel X1, X2 dan X3 memiliki pengaruh positif artinya religiutas, kepercayaan dan reputasi memiliki dampak dengan minat <i>muzzaki</i> dalam menunaikan kewajiban zakat profesi.
6	Diana Fitrisia Pengaruh Transparasi dan Akuntabilitas terhadap pengumpulan	Hasil menunjukan bahwa Transparasi informasi dan Akuntabilitas secara bersama-sama mempengaruhi pengumpulan dana zakat infaq shodaqoh pada LAZ di Surabaya dan Transparasi informasi dan Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap

¹⁵⁷ Elis Mediawati *Analisis Akuntabilitas dan Transparasi laporan keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung* Jurnal Akuntansi Riset , Prodi Akuntansi UPI , Vol 4 No 2, hal 871-881

¹⁵⁸ Indri Yuliantri dan Asma Nur Khoiriyah *Pengaruh kepuasan Muzzaki , Transparasi dan Akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzzaki studi pada LAZ Rumah Zakat* Islamicconomic Jurnal Ekonomi Islam Volume 7 No 2 2016 hal 205-218

¹⁵⁹ Fery Setiawan *pengaruh. Religiutas, Kepercayaan Dan Reputasi terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat profesi di kabupaten ponorogo* (Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017), hal.11.

	dana zakat infaq shodaqoh pada LAZ di Surabaya. ¹⁶⁰	pengumpulan dana zakat infaq shodaqoh pada LAZ di Surabaya
7	Mukhlis Muhammad dan Zulfahmi dengan judul Pengaruh pengetahuan, pendapatan dan kepercayaan terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat di baitulmall kota Lhokesumawe ¹⁶¹	Hasil penelitian bahwa pendapatan dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat sedangkan pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat

Berbeda dengan penelitian terdahulu, Penelitian ini akan meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat (Studi : BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah)

¹⁶⁰ Diana Fitrisia *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat infaq shodaqoh pada LAZ di Surabaya* Akruel Jurnal Akuntansi Vol 2 No 2, 2011 hal 172-199

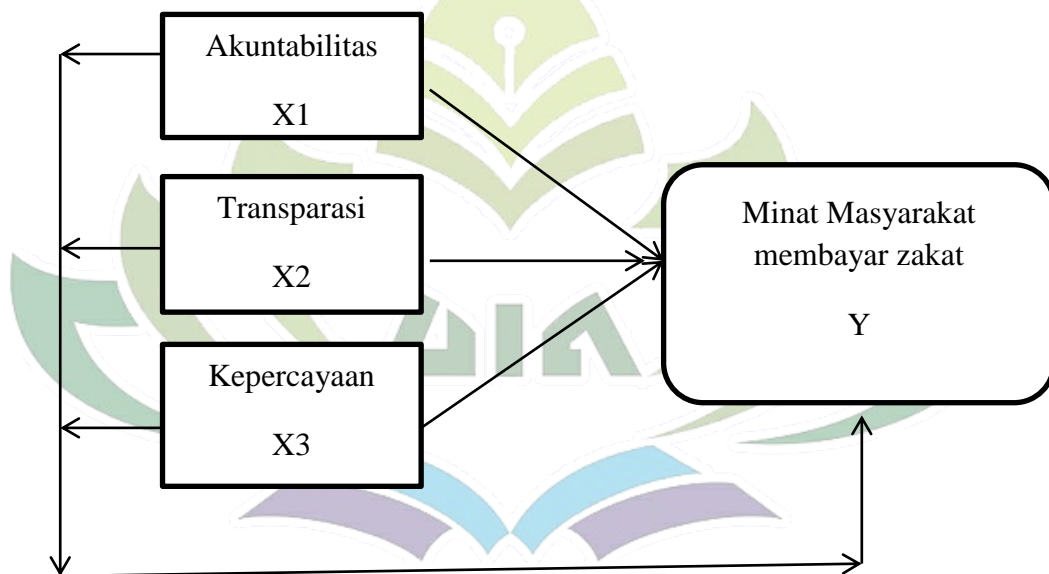
¹⁶¹ Mukhlis Muhammad dan Zulfahmi *Pengaruh pengetahuan, pendapatan dan kepercayaan terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat di baitulmall kota Lhokesumawe*. Volume 01 Nomor 3 Desember tahun 2018 E ISSN : 2615-126 x

M. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini Pengaruh akuntabilitas sebagai variabel X1, Transparasi sebagai variabel X2 dan Kepercayaan sebagai Variabel X3 akan dibuktikan dan dianalisis secara empiris baik parsial maupun simultan.

Skema 2.1

Kerangka pikir



N. Hipotesis

hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₀ = Akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan secara Parsial tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah.

H₁ = Akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan secara parsial berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah.

H₀ = Akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah

H₂ = Akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan secara bersama-sama memiliki pengaruh positif pada minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah.